

e-ISSN: XXXX-XXXX

p-ISSN: XXXX-XXXX

VOL 1 NO 1, DESEMBER 2024

JURNAL PENGABDIAN NEGERI



Austronesia
Akademika

Austronesia Akademika



KATA PENGANTAR

Jurnal Pengabdian Negeri adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh CV. Austronesia Akademika, yang berlokasi di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Jurnal ini berfokus pada publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam konteks pembangunan sosial, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia. Jurnal Pengabdian Negeri menerima berbagai jenis tulisan dalam laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan isu-isu lokal dan nasional. Dengan pendekatan interdisipliner, jurnal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi substansial terhadap pengetahuan di bidang pengabdian masyarakat serta memfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman antara akademisi, praktisi, dan komunitas. Setiap publikasi dalam Jurnal Pengabdian Negeri diharapkan dapat menginspirasi inovasi serta kolaborasi dalam menciptakan solusi dari tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Jurnal ini juga berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan dan pengembangan berkelanjutan. Melalui kegiatan publikasi ini, CV. Austronesia Akademika bertekad untuk memperkuat sinergi antara dunia akademis dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pada Edisi Vol 1 No. 1, 2024, Artikel Pertama berjudul "Transformasi Pola Asuh Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Era Digital" oleh Nur Fitri Eka Asbarini, Baiq Dewi Kamariani, dan Maya Ulyani mengulas tentang upaya perubahan pola asuh yang dapat mencegah fenomena perkawinan anak di era digital. Selanjutnya artikel kedua "Penguatan Peran Generasi Milenial Dalam Politik Cerdas Berintegritas Menyongsong Pemilu 2024" karya Lamidi Lamidi, Fitri Kurnianingsih, dan Mayarni Mayarni membahas pentingnya peran aktif generasi milenial dalam politik dengan integritas menjelang Pemilu 2024. Lalu Artikel Ketiga "Pendampingan Pemangku Kepentingan Dalam Governansi Ekowisata Pesisir Di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau" oleh Alfiandri Alfiandri, Eko Prasajo, dan Roy Valiant Salomo mengeksplorasi pentingnya peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan di Pulau Bintan. Pada Artikel keempat "Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); Studi SDN 013 Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang" oleh Desy Yunasti dan Aspariyana Aspariyana berfokus pada upaya sosialisasi perilaku hidup sehat di sekolah dasar. Terakhir Artikel Kelimana, "Forum Group Discussion Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Busung Panjang" oleh Annissa Valentina, Rizqi Apriani Putri, dan Marliani Marliani membahas pemberdayaan masyarakat pesisir melalui diskusi kelompok terkait potensi sumber daya alam di desa tersebut.

Selamat Membaca !!!



**VOLUME 1
NOMOR 1
DESEMBER, 2024
JURNAL PENGABDIAN NEGERI**

**eISSN: xxxx-xxxx
pISSN: xxxx-xxxx**

TIM EDITOR

PIMPINAN REDAKSI

Mahadiansar | Universitas Maritim Raja Ali Haji. Indonesia.

EDITOR ASOSIASI

Andy Fefta Wijaya | Universitas Brawijaya. Indonesia.

Klara Kumalasari | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Indonesia.

Yudithia | Universitas Maritim Raja Ali Haji. Indonesia.

DEWAN REDAKSI

Eva Amalia | Politeknik Pariwisata Batam. Indonesia.

Wahjoe Pangestoeti | Universitas Maritim Raja Ali Haji. Indonesia.

MITRA BESTARI

Adianto | Universitas Riau. Indonesia.

Adji Suradji Muhammad | Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Indonesia.

Asrifia Ridwan | Universitas Merdeka Madiun. Indonesia

Firda Hidayati | Universitas Brawijaya. Indonesia.

Kiki Wulandari | Universitas Maritim Raja Ali Haji. Indonesia.

Marisa Elsera | Universitas Maritim Raja Ali Haji. Indonesia.

Mohammad Syuzairi | Universitas Maritim Raja Ali Haji. Indonesia

Sangkala | Universitas Hasanuddin. Indonesia.



**DAFTAR ISI
Vol. 1 No. 1, Desember 2024**

Transformasi Pola Asuh Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Era Digital <i>Nur Fitri Eka Asbarini, Baiq Dewi Kamariani, Maya Ulyani</i> DOI: https://doi.org/10.69812/jpn.v1i1.74	1-7
Penguatan Peran Generasi Milenial Dalam Politik Cerdas Berintegritas Menyongsong Pemilu 2024 <i>Lamidi Lamidi, Fitri Kurnianingsih, Mayarni Mayarni</i> DOI: https://doi.org/10.69812/jpn.v1i1.69	8-18
Pendampingan Pemangku Kepentingan Dalam Governansi Ekowisata Pesisir Di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau <i>Alfiandri Alfiandri, Eko Prasajo, Roy Valiant Salomo</i> DOI: https://doi.org/10.69812/jpn.v1i1.83	19-27
Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); Studi SDN 013 Tanjungpinang Barat. Kota Tanjungpinang <i>Desy Yunasti, Aspariyana Aspariyana</i> DOI: https://doi.org/10.69812/jpn.v1i1.84	28-36
Forum Group Discussion Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Busung Panjang <i>Annissa Valentina, Rizqi Apriani Putri, Marliani Marliani</i> DOI: https://doi.org/10.69812/jpn.v1i1.85	53-66
Contributor	-
Author Guidelines	-



Transformasi Pola Asuh Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Era Digital

Nur Fitri Eka Asbarini¹, Baiq Dewi Kamariani², Maya Ulyani³

Program Studi Bisnis Digital, ITSkes Muhammadiyah Selong¹.

Program Studi Administrasi Publik, ITSkes Muhammadiyah Selong²

Program Studi Administasi Kesehatan, ITSkes Muhammadiyah Selong³

Email Korespondensi: ekaasbarini@gmail.com¹

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada orang tua, guru, dan siswa mengenai pola asuh yang efektif dalam mencegah pernikahan anak di era digital. Dengan tingginya angka pernikahan anak di Indonesia, meskipun regulasi telah diperketat, transformasi pola asuh menjadi strategi penting untuk melindungi hak-hak anak. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode ceramah dan pembelajaran langsung kepada 100 peserta, termasuk perwakilan dari organisasi kepemudaan. Fokus pengabdian adalah peningkatan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan anak serta pentingnya peran keluarga dalam membangun karakter anak melalui pendekatan berbasis nilai agama dan norma sosial. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta, khususnya orang tua, masih mengalami kesulitan dalam memahami pola asuh yang sesuai dengan tantangan digitalisasi. Namun, melalui program ini, mereka memperoleh wawasan baru tentang cara membimbing anak di tengah kemajuan teknologi dan menghadapi perubahan emosi anak. Kegiatan ini diapresiasi oleh peserta karena memberikan panduan konkret untuk menghindari praktik pernikahan anak dan memperkuat peran orang tua dalam mendukung pertumbuhan anak secara optimal. Diharapkan program ini dapat menjadi langkah awal untuk merumuskan kebijakan lebih efektif dalam pencegahan pernikahan anak dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat. Selain itu, pendekatan berbasis media digital juga diidentifikasi sebagai alat penting dalam menyebarkan edukasi tentang hak-hak anak dan bahaya pernikahan dini. Dengan langkah kolaboratif, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga masa depan anak melalui pola asuh yang adaptif dan penuh kasih.

Catatan Artikel

Dikirim: 10 November 2024

Dirivisi: 23 November 2024

Diterima: 30 Desember 2024

Kata Kunci

Transformasi, Pola Asuh, Era Digital

 <https://doi.org/10.69812/jpn.v1i1.74>

Artikel akses terbuka di bawah [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Era digital saat ini, mayoritas aktivitas tentunya menggunakan media digital. Hal tersebut menuntun orang tua memperbaharui diri (Pramensari, Jatut Yoga dan Susanti, 2021). Memperbaharui diri berkaitan dengan pola asuh atau pola didik yang diterapkan dalam proses pembelajaran yang dapat mencegah adanya pernikahan anak. Pernikahan anak merupakan isu yang kompleks dan mendalam, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana praktik ini sering kali berakar dari kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai pernikahan anak telah diperketat, angka pernikahan anak di Indonesia tetap tinggi, dengan negara ini menempati peringkat ke-10 di dunia dalam hal jumlah pernikahan anak (Meilani, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak sering kali dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, di mana orang tua beranggapan bahwa pernikahan dapat mengurangi beban finansial (Azinar et al., 2023; Rumble et al., 2018; Tresiana & Duadji, 2021). Selain itu, pernikahan anak juga melanggar hak asasi anak dan berpotensi memperpanjang siklus kemiskinan antar-generasi, karena anak-anak yang menikah muda cenderung mengalami dampak

negatif dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial (Doel-Mackaway, 2023; Ernawati, 2023; Wibowo et al., 2021). Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, NGO, dan pemimpin agama, dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang efektif untuk mencegah pernikahan anak dan melindungi hak-hak anak (Suleman, 2023; Wantu et al., 2021).

Perkawinan anak salah satu faktor penyebabnya adalah pola asuh orang tua (Muslimin, 2024). Oleh karena itu untuk mengantisipasi perkawinan anak pada era digital ini, yang paling berkesan adalah pola asuh orang tua. Perkembangan teknologi menjadi faktor utama terhadap perbedaan pola asuh setiap orang tua (Yoga Prameswari, Aslan dan Indah Susanti, 2021). Setiap orang tua memiliki pola asuh yang berbeda-beda, oleh karena itu akan menghasilkan hasil yang berbeda pada setiap anak dan anak akan memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya (Putri Sukarman, 2020). Pola asuh orang tua memiliki kontribusi yang sangat berharga di dalam hidup anak. Mengapa seperti itu, karna lewat ayah dan ibu anak bisa habituasi dengan lingkungannya, bisa memahami dunia. Ini dikarenakan keluarga sebagai dasar pertama atau pondasi tiang untuk membentuk kepribadian 2 anak. Peran orang tua untuk membekali anak dari rumah dengan norma susila atau norma agama dengan pendekatan yang efektif dari hati ke hati akan membuat anak memahami dampak negatif apabila terlalu jauh bergaul (Lestari, 2019). Pola asuh orang tua adalah kunci utama dalam membentuk kepribadian anak.

Beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak seperti faktor tradisi dan budaya, faktor ekonomi serta faktor keluarga dan pemahaman orang tua dalam memberikan pola asuh pada anak (Kamariani, Baiq Dewi dan Ridwan, 2023). Oleh karena itu, Orang tua memegang kewajiban pertama dan utama penting dalam Mendidik, mengasuh, memelihara dan membesarkan anak. Pada era digital saat ini, orang tua perlu berperan sebagai teman atau kerabat, sebagai orang tua perlu menerapkan pola asuh pada anak dengan memberikan teguran dan nasihat agar anak tidak mengulangi kesalahannya, memberikan kesempatan bagi anak untuk menceritakan masalah yang dihadapi serta memberikan solusinya dan orang tua perlu memberikan perhatian dan cinta kasih kepada anaknya melalui tindakan.

Pengabdian ini bertujuan untuk menegduksi bagaimana para orang tua dalam memberikan pola asuh orang tua sehingga dapat menekan angka pernikahan anak di era digital. Studi ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor penyebab pernikahan anak dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai pihak dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan untuk menyusun strategi pencegahan pernikahan anak yang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta situasi sosial masyarakat saat ini.

Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode ceramah. Metode ini dipilih karena akan efektif dalam menyampaikan informasi kepada para peserta khususnya orang tua dalam hal penjelasan dan pemberian contoh mengenai pentingnya mendidik anak di era digital. Selain penggunaan metode ceramah, kami akan memberikan edukasi langsung (*direct learning*) mengenai transformasi pola asuh khususnya pada era digital saat ini. kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Aston Inn Mataram dengan jumlah peserta 100 orang yang terdiri dari Orang Tua, Guru, siswa-siswi tingka Menengah Atas dan perwakilan dari organisasi Kepemudaan.

Karena pentingnya pola asuh dalam menekan perkawinan anak pada era digital, maka tim pengabdian melakukan kegiatan ini dibarengi dengan penandatanganan kontrak kerjasama (MoU) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Tandatangan Kontrak kerjasama Tim Pengabdian dengan TP PKK Provinsi NTB.

Hasil dan Pembahasan

Jumlah peserta dalam kegiatan pengabdian ini adalah 100 orang yang terdiri dari Orang Tua, Guru, Siswa-siswi dan perwakilan dari organisasi kepemudaan. Kegiatan ini berlangsung selama 1 hari dan dilaksanakan secara offline dan online. Narasumber pada kegiatan ini ada tiga, dua diantaranya menyampaikan secara offline dan satu narasumber menyampaikan materi secara online. Narasumber

pertama dari Kalangan Akadmisi Guru Besar Universitas Negeri Mataram menyampaikan materi secara offline membahas pola asuh perspektif agama dan narasumber kedua dari Ketua TP PKK Provinsi NTB membahas tentang Pola asuh anak dan remaja di era digital dengan penyampaian materi secara *offline*. sedangkan narasumber ketiga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan materi secara offline dengan tema pola asuh anak dan remaja dalam menekan angka perkawinan anak pada era digital.

Dari hasil intraksi dengan peserta, tim menemukan beberapa fakta bahwa sebagian besar peserta khususnya orang tua dan guru masih mengalami kebingungan bagaimana cara memberikan pengasuhan yang baik pada anak ditengah-tengah tranformasi digital yang sangat pesat dan menjadi ketakutan tersendiri bagi siswa dalam menghadapi dunia yang serba digital. Namun setelah mengikuti kegiatan dari tim pengabdian, orang tua, guru dan siswa mendapatkan informasi dengan sumber yang akurat bagaimana cara-cara menghadapi trasformasi digital pada saat ini terutama dalam memberikan pengasuhan kepada anak sehingga dapat menekan angka perkawinan anak.

Kegiatan pengabdian ini sangat diapresiasi oleh para peserta karena dengan adanya pengabdian dengan topik pola asuh pada transformasi era digital saat ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagaimana cara menyikapi anak yang beranjak dewasa dengan segala bentuk perubahan hormonnya, ketidak stabilan emosi dan prilakunya. Para orang tua, guru dan siswa juga dapat memahami hal hal yang dapat dihindari agar tidak terjerumus pada perkawinan anak.

Analisis dari data dan kebijakan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki regulasi yang cukup kuat dalam mencegah perkawinan anak, antara lain melalui beberapa undang-undang seperti UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur batas minimal usia perkawinan dan revisinya pada UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan di lapangan masih sangat signifikan, terutama di wilayah dengan adat dan budaya yang cenderung mendukung perkawinan usia anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024).

1. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan; Meski peraturan sudah jelas, tantangan utama yang muncul adalah persepsi dan pemahaman masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih mempertahankan budaya tradisional dan pandangan keagamaan tertentu yang memperbolehkan atau bahkan mendorong perkawinan anak. Pemahaman mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan mereka seringkali belum dipahami sepenuhnya, baik oleh orang tua, tokoh masyarakat, maupun pemuka agama. Keberadaan kebijakan yang mengatur batas usia pernikahan tidak selalu diterima sebagai hal yang positif, melainkan seringkali dianggap sebagai bentuk intervensi yang tidak sesuai dengan norma-norma lokal.
2. Data Peningkatan Dispensasi Perkawinan; Data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung menunjukkan peningkatan pengajuan dispensasi perkawinan anak secara signifikan. Tahun 2019 tercatat ada 24.865 permohonan dispensasi kawin, dan jumlah ini melonjak pada tahun 2020 menjadi 64.000 permohonan (Badan Peradilan Agama, 2021). Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mencari celah dalam hukum untuk tetap melakukan perkawinan anak, meskipun batasan usia telah ditetapkan. Alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi beragam, namun seringkali berkaitan dengan keinginan untuk menghindari stigma sosial atau karena keterbatasan pemahaman orang tua tentang dampak negatif perkawinan anak.
3. Dampak buruk perkawinan anak mencakup beberapa aspek yang berpengaruh pada individu dan masyarakat secara luas, antara lain:
 - a. Peningkatan Risiko Kesehatan Reproduksi; Anak-anak, terutama perempuan, yang menikah pada usia dini rentan mengalami komplikasi kesehatan reproduksi. Tubuh mereka belum sepenuhnya siap untuk kehamilan dan persalinan, sehingga risiko kematian ibu dan bayi lebih tinggi pada kelompok ini. Masalah kesehatan lain, seperti anemia dan gangguan pertumbuhan anak, juga sering terjadi.
 - b. Putus Sekolah; Banyak anak yang harus berhenti sekolah setelah menikah, sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan mengembangkan

keterampilan kerja menjadi sangat terbatas. Hal ini mengurangi peluang mereka untuk meraih kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri secara ekonomi di masa depan.

- c. Siklus Kemiskinan; Pernikahan anak sering kali berujung pada kesulitan ekonomi karena pasangan muda biasanya tidak memiliki keterampilan kerja atau pengalaman untuk memperoleh penghasilan yang stabil. Akibatnya, mereka cenderung hidup dalam kemiskinan dan sulit keluar dari siklus tersebut, yang juga berpengaruh pada kesejahteraan anak-anak mereka di masa mendatang.
- d. Risiko Kekerasan dalam Rumah Tangga; Anak yang menikah pada usia dini lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Keterbatasan kemampuan untuk membela diri atau melaporkan kekerasan membuat mereka berada dalam situasi yang berisiko, terutama karena ketidakmatangan emosional dan ketergantungan pada pasangan.
- e. Kesehatan Mental dan Emosional yang Buruk; Tekanan akibat pernikahan dan peran sebagai istri atau suami pada usia yang belum matang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti stres, depresi, dan kecemasan. Anak-anak yang menikah dini cenderung kehilangan masa remaja mereka, yang biasanya merupakan waktu untuk pertumbuhan dan pengembangan diri.
- f. Penyebaran Praktik Perkawinan Anak ke Generasi Selanjutnya; Anak-anak yang lahir dari pasangan yang menikah dini sering kali menjadi bagian dari siklus perkawinan anak, terutama dalam keluarga yang memiliki persepsi bahwa perkawinan anak adalah solusi untuk mengatasi masalah sosial atau ekonomi. Hal ini membuat praktik perkawinan anak terus berlangsung dari generasi ke generasi.

Pernikahan anak membawa dampak buruk yang signifikan, baik untuk individu maupun masyarakat. Anak-anak, terutama perempuan, yang menikah pada usia dini menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi, seperti komplikasi kehamilan, kematian ibu dan bayi, serta masalah kesehatan lainnya. Selain itu, banyak dari mereka yang harus putus sekolah, sehingga mengurangi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik secara ekonomi. Kondisi ini memperburuk siklus kemiskinan dan membatasi peluang mereka untuk keluar dari keterbatasan ekonomi. Mereka seringkali mengalami stres, depresi, dan kecemasan akibat peran yang harus mereka jalani pada usia yang belum matang. Terlebih lagi, praktik pernikahan anak sering kali diteruskan ke generasi berikutnya, menciptakan siklus yang sulit untuk diputus. Oleh karena itu, pernikahan anak bukan hanya merugikan individu, tetapi juga memperburuk masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat.

4. Kebijakan yang Belum Terintegrasi Secara Optimal; Meskipun kebijakan nasional telah mencakup perlindungan anak, kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak belum sepenuhnya terinternalisasi dalam program lintas sektor. Masih banyak kementerian atau lembaga terkait yang belum memiliki sinergi yang optimal dalam menanggulangi perkawinan anak. Strategi nasional yang sudah dirumuskan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan masih memerlukan koordinasi dan komitmen lintas sektor yang lebih kuat agar dapat diterapkan secara efektif di berbagai lini pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
5. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak; Dalam menghadapi masalah ini, Indonesia telah mengembangkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak sebagai rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan. Strategi ini mencakup pendekatan holistik, integratif, dan masif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, tokoh adat, hingga tokoh agama. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pilar utama dalam pembangunan bangsa. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menurunkan angka perkawinan anak, tetapi juga mendorong keluarga untuk memainkan peran aktif dalam pengasuhan anak yang lebih berkualitas.
6. Peran Media Digital dalam Advokasi dan Sosialisasi; Di era digital ini, penggunaan media sosial dan platform digital lainnya menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang dampak negatif perkawinan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga terkait lainnya perlu memanfaatkan media digital untuk kampanye pencegahan perkawinan anak yang lebih luas dan efektif. Sosialisasi melalui media digital memiliki potensi menjangkau kelompok usia muda serta orang tua yang dapat terpengaruh oleh informasi yang disampaikan secara mudah dan efisien.

7. Indikator Pencapaian Tujuan SDGs dan RPJMN; Pencegahan perkawinan anak juga berkaitan erat dengan tujuan SDGs (Sustainable Development Goals), khususnya tujuan ke-5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Salah satu indikatornya adalah proporsi perempuan berusia 20-24 tahun yang telah menikah sebelum usia 15 dan 18 tahun (RPJMN, 2020-2024). Target ini tercermin pula dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 yang mengharapkan penurunan angka perkawinan anak secara signifikan.



Sumber: Tim Pengabdian, 2024

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi untuk mencegah perkawinan usia anak telah memadai, pelaksanaan kebijakan di lapangan membutuhkan penguatan, baik melalui edukasi yang berkelanjutan maupun sosialisasi yang mengintegrasikan pendekatan budaya dan keagamaan yang lebih relevan bagi masyarakat setempat. Perkawinan anak di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak dihadapkan pada banyak tantangan, seperti peningkatan dispensasi pernikahan, rendahnya pemahaman tentang dampak negatif, dan kurangnya dukungan dari tokoh adat dan agama. Dampak dari praktik ini sangat luas, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan stabilitas sosial.

Kesimpulan

Untuk mengatasi masalah perkawinan anak, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah peningkatan edukasi dan sosialisasi masyarakat. Program edukasi ini harus melibatkan komunitas dengan risiko tinggi, dengan penyuluhan tentang dampak buruk perkawinan anak. Selain itu, penting untuk melibatkan tokoh agama, adat, dan pemimpin masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan informasi mengenai bahaya pernikahan dini. Sosialisasi yang luas dapat membantu mengubah pemahaman masyarakat dan mengurangi prevalensi praktik ini. Penguatan peran tokoh agama dan adat juga sangat penting dalam pencegahan perkawinan anak. Dengan dukungan mereka, pesan mengenai bahaya pernikahan anak dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Melalui pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal, tokoh agama dan adat dapat berperan sebagai agen perubahan yang mampu mengubah pandangan masyarakat mengenai praktik tersebut. Hal ini diharapkan dapat memperkuat upaya untuk mencegah pernikahan anak dan melindungi hak-hak anak, terutama anak perempuan.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem dispensasi pernikahan yang berlaku saat ini. Pemerintah dapat menetapkan kriteria yang lebih ketat dan memberikan edukasi bagi calon pengantin yang masih di bawah umur tentang risiko dan konsekuensi dari pernikahan dini. Di sisi lain, pengembangan program pemberdayaan ekonomi untuk keluarga miskin juga menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan ekonomi yang sering menjadi alasan orang tua menikahkan anak mereka. Program ini tidak hanya akan membantu mengurangi kemiskinan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan kerja yang bermanfaat untuk masa depan mereka.

Ucapan Terima Kasih

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan perwujudan damah sati Tri Darma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Dosen ITSKes Muhammadiyah Selong. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada bulan 11 Tahun 2023. materi dipilih berdasarkan kebutuhan sasaran terutama dalam hal pemberian pengasuhan orang tua kepada anak agar terhindar dari pernikahan dini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi tentang pola asuh orang tua dalam mencegah perkawinan anak di era digital ini, kepada para peserta yang hadir baik dari kalangan orang tua, guru dan siswa, Tim Dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Para mahasiswa yang menjadi panita pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Azinar, M., Nisa, A. A., & Ediyarsari, P. (2023). *Perceptions of Early Marriage in Junior High School Students in Rural Areas*. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_87
- Doel-Mackaway, H. (2023). Children's Rights in the Asia-Pacific Region: Critical Reflections on Participation, Education, Girls' Rights and Child Marriage. *Canadian Journal of Children S Rights / Revue Canadienne Des Droits Des Enfants*. <https://doi.org/10.22215/cjcr.v10i2.4276>
- Ernawati, E. (2023). Child Participation in Marriage Dispensation in Southeast Asian Muslim Countries From the Perspective of the Convention on the Rights of the Child. *Journal of World Science*. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i8.393>
- Kamariani, Baiq Dewi dan Ridwan, A. (2023). Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi siswa/siswi Tingkat Menengah Atas. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Pola Asuh Anak Dan Remaja Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak Pada Era Digital*. <https://www.kemennppa.go.id/>
- Lestari, I. P. dkk. (2019). Pemberdayaan Ibu strategi Penurunan Angka Pernikahan Dini. *Indonesia Jurnal of Community Empowerment (IJCE)*. *Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo*.
- Meilani, N. (2023). Improving Knowledge and Attitude Towards Child Marriage Prevention Among Senior High School Students. *Journal of Education and Learning (Edulearn)*. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v17i3.20763>
- Muslimin, D. (2024). Pola Asuh Orang Tua Terhadap Resiko Terjadinya Pernikahan Dini pada remaja di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Kesehatan: Mandira Cendekia*, 2964–2434.
- Pramensari, Jatut Yoga dan Susanti, D. I. (2021). Pola Asuh Orang Tua dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi dan Informasi di Era Digital. *Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4. No.
- Putri Sukarman, S. T. (2020). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini. In *Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang*.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024*. (n.d.).
- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An Empirical Exploration of Female Child Marriage Determinants in Indonesia. *BMC Public Health*.

<https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>

- Suleman, F. (2023). The Review of the Masalah Mursalah Related to Early Marriage: Implementation and Orientation. *Jurnal Dinamika Hukum*. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3783>
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). The Practice of Child Marriage: A Profile and Policy Advocacy for Indonesian Government. *Prace I Studia Geograficzne*. <https://doi.org/10.48128/pisg/2021-66.2-07>.
- Wantu, S. M., Abdullah, I., Tamu, Y., & Sari, I. P. (2021). Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo. *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9573>
- Wibowo, H. R., Ratnaningsih, M., Goodwin, N. J., Ulum, D. F., & Minnick, E. (2021). One Household, Two Worlds: Differences of Perception Towards Child Marriage Among Adolescent Children and Adults in Indonesia. *The Lancet Regional Health - Western Pacific*. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>
- Yoga Prameswari, Aslan dan Indah Susanti, D. (2021). Pola Asuh Orang Tua Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Dan Informasi Di Era Digital. *Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 04, No.04(2614-574X), 336–345.



Penguatan Peran Generasi Milenial Dalam Politik Cerdas Berintegritas Menyongsong Pemilu 2024

Lamidi Lamidi¹, Fitri Kurnianingsih², Mayarni Mayarni³

Program Pascasarjana, Magister Administrasi Publik. Universitas Maritim Raja Ali Haji¹

Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Maritim Raja Ali Haji²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Riau³

Email Korespondensi: lamidi@umrah.ac.id¹

Abstrak

tujuan utamanya dalam kegiatan Pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran politik generasi milenial di Kabupaten Bintan dalam menyongsong Pemilu 2024 dengan mengedepankan prinsip politik cerdas berintegritas. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan mengadakan Kelas Politik Cerdas Berintegritas yang melibatkan diskusi dan penyuluhan mengenai pentingnya pemilihan pemimpin berdasarkan integritas dan bukan politik uang. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa peserta, yang merupakan generasi milenial, semakin memahami pentingnya politik yang bersih dan berintegritas, serta memiliki kesadaran tinggi terhadap hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Pembahasan mendalam juga dilakukan mengenai peran aktif milenial dalam mengawasi jalannya Pemilu dan upaya menghindari praktik politik uang. Kesimpulannya, generasi milenial Kabupaten Bintan dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif dalam proses politik di daerah mereka, asalkan mereka memilih pemimpin yang memiliki kualitas dan integritas yang tinggi. Saran yang diberikan adalah untuk terus menguatkan pendidikan politik melalui program-program yang relevan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan politik yang bersih dan sehat untuk masa depan yang lebih baik.

Catatan Artikel

Dikirim: 07 Desember 2024

Dirivisi: 25 Desember 2024

Diterima: 30 Desember 2024

Kata Kunci

Peran, Generasi Milenial, Politik Cerdas Berintegritas



<https://doi.org/10.69812/jpn.v1i1.69>

Artikel akses terbuka di bawah [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Politik merupakan bagian integral dari kehidupan bernegara yang tidak hanya terbatas pada proses pemilihan pemimpin, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya (Deth, 2014). Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang yang memandang politik sebagai arena persaingan untuk memperoleh kekuasaan, jabatan, atau bahkan kekayaan pribadi, tanpa mengindahkan prinsip-prinsip moral yang seharusnya menjadi dasar dari setiap tindakan politik (Christensen, 1992; Christensen, 2011). Realitas inilah yang melahirkan banyak permasalahan politik, salah satunya adalah korupsi yang menjadi penyakit utama dalam sistem politik di banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi politik, yang sering kali melibatkan pejabat publik, anggota legislatif, dan kepala daerah, memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan mencederai nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem politik negara (Fatkhurohman, 2010; Zaetun & Mariyah, 2020).

Korupsi yang terjadi dalam dunia politik sangat berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, di mana pejabat menggunakan posisinya untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompoknya, serta pengabaian terhadap hak-hak rakyat (Hakim, 2007; Smith & Hirst, 2001). Selain itu, dalam banyak kasus, demokrasi juga tergerus dengan adanya praktek-praktek politik yang tidak transparan dan tidak akuntabel (Imansyah, 2012). Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia, yang sedang berjuang untuk mewujudkan tatanan negara yang lebih adil dan sejahtera. Di tengah-tengah

permasalahan tersebut, keberadaan generasi muda, khususnya generasi milenial, menjadi harapan baru untuk membawa perubahan dalam politik Indonesia menuju arah yang lebih baik.

Generasi milenial yang lahir antara tahun 1980 hingga 2000 memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Milenial lebih terbuka terhadap perubahan dan cenderung lebih kritis terhadap kondisi yang ada. Mereka lebih mudah terpengaruh oleh teknologi dan informasi yang berkembang pesat, serta memiliki pandangan yang lebih rasional dan pragmatis mengenai berbagai masalah, termasuk politik (Firdhaus, 2022; Rhodes, 2017). Oleh karena itu, generasi milenial memegang peranan yang sangat penting dalam dunia politik, baik sebagai pemilih, peserta kampanye, maupun calon pemimpin di masa depan. Dalam konteks ini, pendidikan politik yang berbasis pada integritas sangat penting untuk membentuk karakter mereka sebagai pemimpin yang cerdas dan berintegritas.

Sebagai upaya untuk mempersiapkan generasi milenial dalam menghadapi tantangan politik di masa depan, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas bagi generasi milenial Kabupaten Bintan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman politik, etika, dan integritas di kalangan generasi muda, serta mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam Pemilu 2024 yang akan datang. Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran politik yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan dan moral yang tinggi, serta untuk mempersiapkan mereka agar tidak terjebak dalam praktik politik yang tidak sehat seperti politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kegiatan ini memiliki relevansi yang sangat penting mengingat Pemilu 2024 akan menjadi ajang penting dalam menentukan masa depan Indonesia. Selain itu, Pemilu 2024 juga akan menjadi ajang pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk generasi milenial. Dengan mengedepankan nilai-nilai integritas, pendidikan politik yang diberikan dalam program ini diharapkan dapat menjadi modal penting bagi para peserta untuk berperan aktif dalam menyongsong Pemilu yang bersih dan transparan. Program ini juga diharapkan dapat menyiapkan mereka untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam memilih calon pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas yang mumpuni, tetapi juga berintegritas tinggi.

Selain itu, melalui kegiatan ini, para peserta juga diberikan pemahaman mengenai peran mereka sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemilu. Partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu menjadi penting untuk memastikan bahwa proses pemilu dapat berlangsung dengan adil dan tanpa adanya penyimpangan. Oleh karena itu, generasi milenial diharapkan tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga pengawas yang aktif dalam mengawasi jalannya pemilu. Dengan demikian, mereka dapat membantu menciptakan proses demokrasi yang lebih bersih dan berkualitas.

Pendidikan politik yang diberikan dalam program ini tidak hanya terbatas pada pemahaman mengenai teori-teori politik, tetapi juga dilengkapi dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Wardhani, 2018). Beberapa keterampilan yang diajarkan dalam program ini antara lain kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan bernegosiasi, serta kemampuan untuk mengelola dan menggunakan media sosial secara efektif dalam kampanye politik. Keterampilan ini sangat relevan dengan kebutuhan generasi milenial yang semakin terhubung dengan dunia digital. Melalui pelatihan dan seminar yang diberikan, peserta diharapkan dapat memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan aspirasi politik mereka dengan cara yang cerdas dan berintegritas.

Di sisi lain, penting juga untuk menyadari bahwa generasi milenial tidak dapat dipandang sebagai kelompok yang homogen. Terdapat banyak perbedaan dalam pola pikir, pandangan, dan sikap mereka terhadap politik. Oleh karena itu, pendekatan dalam pendidikan politik harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu. Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas ini dirancang dengan memperhatikan hal tersebut, dengan tujuan agar semua peserta dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang politik, serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai integritas dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik dalam kehidupan pribadi maupun di dunia politik.

Lebih lanjut, penguatan pendidikan politik bagi generasi milenial juga sejalan dengan agenda nasional untuk memperkuat demokrasi dan mencegah munculnya praktik politik yang merugikan masyarakat. Pendidikan politik yang berfokus pada integritas akan membantu menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas politiknya. Selain itu, melalui program ini, diharapkan generasi milenial akan semakin sadar akan pentingnya partisipasi mereka dalam politik, serta dapat membangun negara yang lebih baik dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan yang luhur.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam pendidikan politik adalah bagaimana mengubah pola pikir masyarakat yang telah terjebak dalam budaya politik yang buruk, seperti politik uang dan manipulasi suara. Oleh karena itu, program ini juga berupaya untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan transparansi sejak dini kepada generasi milenial. Dengan demikian, mereka tidak hanya akan menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga akan memiliki keberanian untuk menentang praktik-praktik politik yang merugikan masyarakat dan mengancam integritas sistem demokrasi. Kesadaran politik yang tinggi dan integritas yang kuat akan menjadi modal utama bagi generasi milenial untuk terlibat aktif dalam Pemilu 2024 dan mengawal jalannya proses demokrasi. Pemilu bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang memilih masa depan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi generasi milenial untuk mempersiapkan diri dengan baik agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih pemimpin yang mampu membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik.

Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan generasi milenial yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi dalam berpolitik. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan yang dihadapi oleh generasi milenial dalam politik semakin kompleks. Mereka harus mampu memanfaatkan teknologi untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pendidikan politik yang berfokus pada integritas sangat penting untuk membekali generasi milenial dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani dunia politik yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas ini melibatkan beberapa tahapan penting yang dirancang untuk memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan politik bagi generasi milenial di Kabupaten Bintan. Kegiatan pengabdian dimulai dengan persiapan yang matang, yang mencakup observasi awal mengenai kondisi masyarakat, terutama generasi milenial, dalam memahami politik dan integritas. Setelah itu, tahap berikutnya adalah penyelenggaraan kegiatan pengabdian yang meliputi seminar, diskusi, dan pelatihan keterampilan (Behr, 2006). Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan para pemateri yang ahli di bidangnya, yang akan memberikan pemahaman terkait dengan politik yang bersih, etika politik, dan pentingnya memiliki integritas dalam berpolitik. Melalui pendekatan ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh wawasan yang komprehensif mengenai peran mereka dalam sistem politik, serta bagaimana menjaga nilai-nilai integritas dalam dunia politik yang sering kali diwarnai oleh kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Proses kerja selanjutnya adalah dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok untuk memfasilitasi pemahaman peserta mengenai pentingnya politik cerdas dan berintegritas (Rickards, 1999). Ceramah dilakukan dengan menampilkan materi yang relevan tentang politik berintegritas, dengan menggunakan slide presentasi yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta. Tujuannya adalah agar mereka tidak hanya memahami konsep dasar politik, tetapi juga bisa melihat aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks Pemilu 2024 yang semakin dekat. Selain ceramah, diskusi kelompok juga dilaksanakan untuk merangsang peserta agar lebih aktif dan kritis dalam membahas isu-isu terkait pemilu dan politik yang berintegritas. Dalam diskusi ini, peserta diharapkan dapat mengungkapkan pemikiran mereka mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas dalam dunia politik serta solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Selanjutnya, kegiatan pengabdian ini juga mencakup pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan generasi milenial dalam dunia politik, seperti kemampuan berbicara di depan umum, negosiasi, dan penggunaan media sosial untuk kampanye politik yang efektif. Keterampilan ini sangat penting bagi peserta yang ingin terlibat aktif dalam dunia politik dan memberikan kontribusi positif dalam pemilu. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan menjelaskan visi serta misi mereka dengan cara yang jujur dan berintegritas. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi politik. Dengan keterampilan yang mereka peroleh melalui pelatihan ini, generasi milenial diharapkan dapat menjadi pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi, serta mampu mengawasi jalannya pemilu untuk menciptakan demokrasi yang lebih bersih dan sehat.

Hasil dan Pembahasan

1. Aktivitas Peserta KPC Berintegritas

Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas (KPC) yang diselenggarakan di Kabupaten Bintan merupakan sebuah inisiatif untuk mengedukasi generasi milenial mengenai pentingnya memiliki kesadaran politik yang berbasis pada nilai-nilai integritas. Aktivitas utama yang dilakukan dalam program ini meliputi seminar, diskusi, serta pelatihan keterampilan yang semuanya dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang politik yang bersih dan tidak terpengaruh oleh praktik-praktik korupsi. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam menghadapi tantangan politik di Indonesia, yang saat ini sering kali dicemari oleh politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan. Peserta yang terlibat dalam program ini adalah generasi milenial yang dipilih berdasarkan minat mereka terhadap politik serta potensi mereka untuk menjadi agen perubahan yang dapat berperan aktif dalam mengubah wajah politik di daerah mereka.

Salah satu aktivitas yang paling penting dalam KPC adalah seminar yang mengundang para pemateri yang berkompeten di bidang politik dan integritas. Pada seminar ini, peserta diberi kesempatan untuk mendengarkan penjelasan mengenai berbagai konsep dasar dalam politik, termasuk pentingnya menjaga etika dan moral dalam setiap proses politik. Pemateri juga menekankan bagaimana politik dapat dijalankan dengan cara yang adil dan transparan, tanpa terjebak dalam kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam seminar ini, peserta tidak hanya diberikan teori, tetapi juga contoh-contoh konkret tentang bagaimana politik dapat diubah menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan sosial, bukan sekadar sarana untuk memperoleh kekuasaan atau keuntungan pribadi. Kegiatan ini sangat mengedukasi peserta untuk lebih peka terhadap kondisi politik yang ada dan untuk mengambil peran aktif dalam menciptakan perubahan yang positif.

Selain seminar, diskusi juga menjadi salah satu bentuk aktivitas yang cukup penting dalam KPC Berintegritas. Diskusi ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk berbagi pandangan dan perspektif mereka mengenai kondisi politik saat ini dan bagaimana generasi muda dapat menghadapinya dengan cara yang lebih baik. Dalam diskusi ini, peserta dapat menggali lebih dalam tentang apa yang mereka pahami mengenai politik yang bersih, serta tantangan yang harus dihadapi dalam mempertahankan integritas dalam dunia politik. Melalui diskusi ini, peserta diajak untuk berpikir kritis dan lebih reflektif mengenai peran mereka sebagai calon pemilih atau calon pemimpin di masa depan. Diskusi ini juga berfungsi untuk mengembangkan keterampilan analisis politik peserta, yang sangat penting untuk dapat memahami situasi politik yang berkembang dan membuat keputusan yang tepat dalam memilih calon pemimpin yang memiliki integritas tinggi.

Pelatihan keterampilan juga menjadi bagian integral dari kegiatan KPC Berintegritas. Keterampilan yang diajarkan dalam pelatihan ini meliputi kemampuan berbicara di depan publik, kemampuan bernegosiasi, serta penggunaan media sosial untuk berkomunikasi secara efektif dalam konteks politik. Dalam pelatihan berbicara di depan publik, peserta diberikan latihan untuk mengasah kemampuan mereka dalam menyampaikan pendapat dan visi politik dengan cara yang jelas dan persuasif. Pelatihan ini sangat relevan karena di era digital saat ini, kemampuan untuk berkomunikasi

dengan efektif di depan publik dan melalui platform digital sangat penting untuk membangun citra politik yang baik. Selain itu, pelatihan negosiasi memberikan peserta keterampilan dalam berinteraksi dan berdialog dengan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, serta menjaga integritas dalam setiap proses negosiasi. Pelatihan keterampilan ini diharapkan dapat mempersiapkan peserta untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki keterampilan komunikasi yang efektif.

Sebagai tambahan, para peserta juga dilibatkan dalam observasi langsung terhadap pelaksanaan Pemilu dan politik di daerah lain sebagai bagian dari riset mereka. Kegiatan ini dilakukan untuk memberi peserta gambaran nyata mengenai bagaimana proses politik dan pemilu dijalankan di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip politik yang berintegritas. Melalui observasi ini, peserta diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan dalam praktik politik, serta bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu. Hal ini sangat penting untuk membangun kesadaran politik di kalangan generasi milenial yang merupakan pemilih dan calon pemimpin masa depan. Dengan pengalaman langsung ini, peserta diharapkan dapat memahami bagaimana proses politik yang bersih dan berintegritas dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan dalam peran mereka di masa depan.

Secara keseluruhan, aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam Kelas Politik Cerdas Berintegritas ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menghadapi tantangan politik di Indonesia. Peserta tidak hanya diberikan teori tentang politik, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan politik nyata. Melalui seminar, diskusi, pelatihan keterampilan, dan observasi langsung, peserta diharapkan dapat menjadi pemimpin muda yang cerdas dan berintegritas, serta mampu berperan aktif dalam memajukan politik yang lebih bersih dan adil di masa depan. Dengan adanya kegiatan ini, generasi milenial di Kabupaten Bintan dapat membawa perubahan positif dalam sistem politik yang akan berpengaruh tidak hanya pada Pemilu 2024, tetapi juga pada masa depan politik Indonesia secara keseluruhan.

2. Pemahaman Materi oleh Peserta KPC Berintegritas

Pemahaman materi oleh peserta Kelas Politik Cerdas Berintegritas (KPC) di Kabupaten Bintan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan dari program ini. Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta diberikan materi yang mencakup berbagai aspek penting dalam politik, seperti teori dasar politik, etika politik, prinsip-prinsip integritas, dan pentingnya transparansi dalam setiap proses politik. Peserta diajak untuk memahami bahwa politik yang cerdas tidak hanya mengutamakan kemenangan atau kekuasaan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral yang luhur, yang harus dijaga untuk menghindari praktik-praktik buruk seperti korupsi dan kolusi. Pemahaman ini menjadi sangat penting, mengingat bahwa banyak generasi milenial yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya integritas dalam politik dan cenderung terpengaruh oleh budaya politik uang yang marak di Indonesia.

Setelah mengikuti seminar dan ceramah yang disampaikan oleh para pemateri yang berkompeten, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar yang membentuk politik yang berintegritas. Banyak peserta yang menyadari bahwa untuk menciptakan sistem politik yang bersih, mereka sebagai generasi muda harus terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, baik sebagai pemilih yang cerdas maupun sebagai calon pemimpin di masa depan. Melalui materi yang disampaikan, peserta memahami bahwa integritas adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memihak kepada kepentingan rakyat banyak. Selain itu, mereka juga mempelajari bahwa politik bukanlah sekadar sarana untuk meraih kekuasaan, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Pemahaman peserta tentang pentingnya nilai-nilai moral dalam politik semakin diperkuat melalui diskusi interaktif yang diadakan selama program. Diskusi ini memungkinkan peserta untuk mengemukakan pandangan mereka mengenai kondisi politik yang ada dan bagaimana mereka bisa

berkontribusi untuk mengubahnya. Banyak peserta yang mengungkapkan pandangan kritis mereka terhadap situasi politik yang sering kali terkesan kotor dan penuh dengan kepentingan pribadi. Mereka juga semakin menyadari bahwa menjaga integritas dalam politik bukan hanya soal tidak terlibat dalam praktik-praktik korupsi, tetapi juga tentang menjalankan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap keputusan politik yang diambil. Diskusi ini berfungsi sebagai wahana bagi peserta untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai berbagai isu politik yang ada, serta untuk melihat bagaimana mereka dapat berperan dalam memperbaiki sistem politik yang ada dengan cara yang lebih adil dan berintegritas.

Dalam sesi pelatihan keterampilan, peserta juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kemampuan komunikasi dalam politik. Mereka dilatih untuk berbicara di depan publik dengan cara yang jelas dan persuasif, serta untuk mengungkapkan pandangan politik mereka dengan penuh integritas dan tanpa ada pemalsuan atau manipulasi informasi. Pemahaman ini sangat penting karena kemampuan untuk berbicara di depan publik merupakan salah satu keterampilan utama yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin politik yang berintegritas. Selama pelatihan, peserta diberikan simulasi untuk menyampaikan pidato atau pendapat mereka di depan audiens, dan mereka diberikan feedback mengenai cara mereka menyampaikan pesan dengan cara yang tidak hanya efektif, tetapi juga berbasis pada nilai-nilai moral yang tinggi.



Gambar 1. Penyampaian Materi dalam Pemateri
Sumber: Tim Pengabdian, 2024

Pentingnya pemahaman mengenai integritas dalam politik semakin ditekankan melalui pembelajaran yang berfokus pada etika politik dan penghindaran dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti politik uang. Dalam materi ini, peserta diajarkan mengenai mekanisme politik yang sehat, di mana para politisi harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghindari perilaku yang dapat merugikan rakyat, seperti suap atau manipulasi suara. Pemahaman ini membantu peserta untuk memiliki perspektif yang lebih jernih mengenai bagaimana mereka harus berperilaku dalam dunia politik, baik sebagai pemilih yang cerdas maupun sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Secara keseluruhan, pemahaman materi oleh peserta KPC Berintegritas menunjukkan bahwa mereka semakin sadar akan pentingnya memiliki sikap dan perilaku yang berintegritas dalam dunia politik. Peserta tidak hanya memahami teori dan konsep yang diajarkan, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan kondisi politik yang ada saat ini. Melalui pemahaman yang lebih mendalam ini, diharapkan para peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai politik yang bersih dalam kehidupan sehari-hari dan berperan aktif dalam proses demokrasi di Indonesia, khususnya dalam menyongsong Pemilu 2024 yang akan datang.

3. Wawasan Peserta KPC Berintegritas

Peningkatan wawasan peserta Kelas Politik Cerdas Berintegritas (KPC) di Kabupaten Bintan menjadi salah satu hasil yang signifikan dari program ini. Wawasan yang dimaksud bukan hanya terbatas pada pengetahuan teoritis mengenai politik, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang dinamika politik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti serangkaian seminar, diskusi, dan pelatihan keterampilan, peserta memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana politik berintegritas dapat dijalankan dalam konteks yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sebagian besar peserta menyadari bahwa politik yang bersih dan berintegritas bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan, namun mereka juga memahami bahwa mereka memiliki peran kunci dalam mencapainya, terutama dalam proses Pemilu 2024 yang semakin dekat.

Salah satu peningkatan wawasan yang paling terlihat adalah pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Sebelumnya, banyak peserta yang memiliki pemahaman yang kurang jelas mengenai mekanisme pemilu dan bagaimana cara berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Setelah mengikuti program KPC, mereka tidak hanya mengetahui tentang hak pilih mereka, tetapi juga mengenai pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas dan tidak terlibat dalam praktik politik uang. Mereka juga semakin sadar akan pentingnya peran mereka sebagai pengawas dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden. Wawasan ini sangat penting untuk membangun budaya politik yang lebih sehat, di mana setiap pemilih bertanggung jawab terhadap hasil pemilu dan dampaknya bagi masa depan negara.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab oleh Peserta
Sumber: Tim Pengabdian, 2024

Selain itu, peserta juga mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang hubungan antara politik dan etika. Materi yang diajarkan menekankan bahwa politik yang berintegritas harus mengutamakan kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka belajar bahwa seorang pemimpin harus memegang teguh prinsip moral dan etika dalam setiap keputusan yang diambil, serta bertanggung jawab atas dampak dari kebijakan yang diimplementasikan. Melalui diskusi yang interaktif, peserta lebih memahami bahwa dalam dunia politik, etika sangat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Sebagian besar peserta menyadari bahwa mereka harus menjadi bagian dari perubahan ini, tidak hanya dengan memilih pemimpin yang jujur, tetapi juga dengan menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Program ini juga memperluas wawasan peserta mengenai tantangan yang dihadapi oleh generasi milenial dalam dunia politik. Banyak dari mereka yang sebelumnya merasa apatis terhadap politik atau menganggap bahwa perubahan tidak mungkin terjadi. Namun, setelah mengikuti pelatihan dan diskusi dalam KPC, peserta menyadari bahwa generasi milenial memiliki peran besar dalam mengubah sistem politik yang ada. Mereka memahami bahwa perubahan tersebut tidak hanya dapat terjadi melalui pemilihan pemimpin yang tepat, tetapi juga melalui upaya bersama untuk mengatasi permasalahan yang ada, seperti korupsi dan politik uang. Dengan wawasan ini, peserta menjadi lebih

termotivasi untuk terlibat aktif dalam politik, tidak hanya sebagai pemilih yang cerdas, tetapi juga sebagai penggerak perubahan di komunitas mereka.

Terakhir, kegiatan ini juga memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran media sosial dalam politik. Peserta dilatih untuk memahami bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyuarakan pendapat politik mereka dengan cara yang cerdas dan berintegritas. Di era digital ini, media sosial memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi jalannya pemilu. Melalui pelatihan ini, peserta diberi pemahaman tentang cara menggunakan media sosial untuk kampanye politik yang bersih, serta bagaimana menghindari penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat merusak integritas proses politik. Dengan wawasan ini, peserta diharapkan dapat memanfaatkan media sosial dengan bijak untuk menyebarkan pesan-pesan positif mengenai politik yang berintegritas dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keadilan dan kebenaran.

Secara keseluruhan, wawasan yang diperoleh oleh peserta KPC Berintegritas sangat berharga dalam mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan politik di masa depan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam demokrasi, etika politik, serta pentingnya media sosial dalam kampanye politik, peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membawa politik yang lebih sehat, transparan, dan berintegritas. Program ini tidak hanya memberi wawasan mengenai teori politik, tetapi juga menyiapkan peserta dengan keterampilan praktis yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, terutama menjelang Pemilu 2024. Dengan wawasan yang lebih mendalam ini, peserta akan lebih siap untuk berperan aktif dalam memperbaiki sistem politik Indonesia dan mengawal jalannya pemilu dengan penuh integritas.

4. Peran Generasi Milenial Kabupaten Bintan dalam Politik Cerdas Berintegritas Menyongsong Pemilu 2024

Generasi milenial di Kabupaten Bintan memiliki peran yang sangat penting dalam menyongsong Pemilu 2024, terutama dalam mengedepankan politik cerdas yang berintegritas. Sebagai generasi yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi arah politik, milenial tidak hanya harus berperan sebagai pemilih yang cerdas, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang dapat membawa perbaikan dalam sistem politik yang ada. Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas (KPC) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi milenial tentang bagaimana menjalankan peran mereka dalam politik secara sehat, tanpa terjebak dalam praktik politik yang merugikan masyarakat, seperti politik uang, korupsi, dan kolusi. Melalui pendidikan politik yang berbasis integritas, generasi milenial di Kabupaten Bintan dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya politik yang lebih transparan dan adil di Pemilu 2024.

Salah satu peran penting yang dapat dimainkan oleh generasi milenial adalah menjadi pemilih yang cerdas dan kritis dalam memilih pemimpin. Pemilu 2024 akan menjadi ajang pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah yang melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk generasi milenial. Dengan mengikuti program KPC Berintegritas, peserta semakin menyadari pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas tinggi, serta memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan daerah dan negara. Mereka dilatih untuk tidak hanya melihat popularitas atau karisma calon pemimpin, tetapi juga menilai kualitas dan rekam jejak calon tersebut dalam menjaga integritas dan memenuhi janji-janji politik mereka. Dengan menjadi pemilih yang cerdas, generasi milenial di Kabupaten Bintan dapat memastikan bahwa Pemilu 2024 menghasilkan pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tanpa terjebak dalam praktik-praktik korupsi.

Selain itu, generasi milenial juga dapat berperan sebagai pengawas dalam jalannya pemilu. Mereka diajak untuk memahami bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil adalah dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua tahapan pemilu. Program KPC Berintegritas memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam memastikan bahwa pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti

keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Sebagai generasi yang lebih melek teknologi, milenial di Kabupaten Bintan juga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan pentingnya pengawasan pemilu, menyebarkan informasi yang benar, serta melaporkan segala bentuk kecurangan atau penyimpangan yang terjadi selama proses pemilu. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga pengawas yang aktif dalam menjaga keabsahan dan integritas pemilu.

Dalam konteks yang lebih luas, generasi milenial Kabupaten Bintan juga dapat berperan dalam membangun budaya politik yang sehat. Salah satu tantangan terbesar dalam dunia politik saat ini adalah adanya praktik politik uang yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Melalui program KPC Berintegritas, peserta dilatih untuk menanggulangi praktik-praktik ini dengan cara menyuarakan pentingnya politik yang bebas dari pengaruh uang dan kepentingan pribadi. Mereka diberikan pemahaman mengenai dampak buruk dari politik uang terhadap demokrasi dan bagaimana politik uang dapat merusak kualitas pemilu serta menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Dengan pengetahuan ini, generasi milenial di Kabupaten Bintan dapat mengambil sikap tegas dalam menolak politik uang dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu secara jujur dan adil.

Lebih lanjut, generasi milenial juga dapat menjadi agen perubahan dengan memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat dan mengutamakan kepentingan umum. Dalam program KPC Berintegritas, peserta juga diajarkan tentang pentingnya memiliki visi politik yang jelas dan bertanggung jawab. Sebagai calon pemimpin masa depan, milenial di Kabupaten Bintan dilatih untuk memahami bahwa politik yang berintegritas harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir orang atau kelompok. Mereka didorong untuk aktif dalam organisasi politik atau masyarakat sipil yang memiliki visi untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Melalui gerakan ini, generasi milenial dapat menciptakan perubahan politik yang lebih baik, yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Secara keseluruhan, generasi milenial di Kabupaten Bintan memiliki peran yang sangat vital dalam menyongsong Pemilu 2024 dengan politik cerdas berintegritas. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta pengetahuan tentang bagaimana menjalankan peran sebagai pengawas dan penggerak perubahan, generasi milenial dapat memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan adil, jujur, dan bebas dari praktik politik yang merusak. Program KPC Berintegritas telah memberikan landasan yang kuat bagi mereka untuk mengambil peran aktif dalam memajukan politik yang lebih baik, serta menjadi pemimpin masa depan yang memiliki integritas dan dapat dipercaya untuk mewujudkan kemajuan bagi masyarakat dan negara. Dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi, generasi milenial Kabupaten Bintan dapat membawa perubahan positif bagi sistem politik Indonesia, dan memastikan bahwa Pemilu 2024 akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan berdedikasi untuk kepentingan rakyat.

Kesimpulan

Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas (KPC) di Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa pendidikan politik yang berbasis pada integritas memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi milenial. Melalui seminar, diskusi, dan pelatihan keterampilan, peserta diajarkan untuk memahami pentingnya menjaga etika politik, menghindari praktik politik yang merugikan seperti korupsi dan politik uang, serta berperan aktif dalam menciptakan sistem politik yang bersih. Peserta yang terlibat dalam program ini tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis mengenai politik, tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan untuk terlibat dalam dunia politik yang semakin kompleks dan dinamis.

Generasi milenial di Kabupaten Bintan, setelah mengikuti program ini, menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi. Mereka menyadari bahwa sebagai pemilih, mereka harus cerdas dalam memilih calon pemimpin yang memiliki integritas dan mampu membawa perubahan positif. Selain itu, mereka juga memahami pentingnya peran mereka sebagai pengawas dalam jalannya pemilu untuk memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung dengan adil dan transparan. Melalui pengawasan yang aktif dan penggunaan media sosial

yang bijak, generasi milenial dapat berkontribusi besar dalam menjaga integritas pemilu dan mencegah praktik-praktik yang merusak demokrasi.

Dalam konteks Pemilu 2024 yang semakin dekat, program ini telah berhasil menanamkan nilai-nilai politik yang berintegritas kepada generasi milenial Kabupaten Bintan. Mereka kini dipersiapkan untuk tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga penggerak perubahan yang dapat membawa politik Indonesia menuju arah yang lebih baik. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam politik, generasi milenial ini diharapkan dapat mengatasi tantangan besar dalam dunia politik, seperti politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan pelaksanaan Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas bagi Generasi Milenial Kabupaten Bintan, khususnya kepada para peserta yang telah aktif berpartisipasi dan menunjukkan antusiasme tinggi dalam setiap kegiatan yang kami selenggarakan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pemateri yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan berharga mengenai politik berintegritas, serta kepada mitra kerja kami, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bintan, yang telah mendukung kami dalam menyelenggarakan program ini dengan penuh dedikasi. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah memberikan fasilitas dan dukungan penuh dalam menyukseskan kegiatan ini, serta semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu dalam pelaksanaan dan pengorganisasian kegiatan.

Daftar Pustaka

- Behr, A. L. (2006). Exploring the lecture method: An empirical study. *Studies in Higher Education*, 13(2), 189–200. <https://doi.org/10.1080/03075078812331377866>
- Christensen, C. M. (1992). *The innovator's challenge: Understanding the influence of market environment on processes of technology development in the rigid disk drive industry*. ProQuest Dissertations Publishing. <https://www.proquest.com/openview/3b6066bfa4f16aaff0baef9838b6af38/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- Christensen, H. S. (2011). Political activities on the Internet: Slacktivism or political participation by other means? *First Monday*, 16(2), 1–10. <https://doi.org/10.5210/FM.V16I2.3336>
- Deth, J. W. Van. (2014). A conceptual map of political participation. *Acta Politica*, 49(3), 349–367. <https://doi.org/10.1057/AP.2014.6>
- Fatkurohman, F. (2010). *Pembubaran partai politik di Indonesia : tinjauan historis normatif pembubaran parpol sebelum dan sesudah terbentuknya Mahkamah Konstitusi*. Setara Press.
- Firdhaus, R. Y. (2022). Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hankam. *OSFPreprints*. <https://doi.org/10.31219/OSF.IO/KHN2R>
- Hakim, A. (2007). *Korupsi dan Reformasi Birokrasi*.
- Imansyah, T. (2012). Regulasi partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan partai politik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 375–395. <https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V1I3.91>
- Rhodes, R. A. W. (2017). *Interpretive Political Science: Selected Essays*. Oxford University Press. <https://www.amazon.com/Interpretive-Political-Science-Selected-Essays/dp/0198786115>
- Rickards, T. (1999). Brainstorming Revisited: A Question of Context. *International Journal of Management Reviews*, 1(1), 91–110. <https://doi.org/10.1111/1468-2370.00006>
- Smith, G., & Hirst, A. (2001). Strategic political segmentation - A new approach for a new era of political marketing. *European Journal of Marketing*, 35(9/10), 1058–1073. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000005958>

**Penguatan Peran Generasi Milenial Kabupaten Bintan dalam Politik Cerdas Berintegritas
Menyongsong Pemilu 2024**

Vol 1, No 1, Desember (2024): Halaman: 8-18

- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62. <https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V10I1.8407>
- Zaetun, S., & Mariyah, C. (2020). Politik Kekerabatan dalam keterwakilan perempuan pada rekrutmen politik partai nasdem pada pemilu 2019. *The Joutnalish: Social and Government*, 1(3), 119–129.



Pendampingan Pemangku Kepentingan Dalam Governansi Ekowisata Pesisir Di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Alfiandri Alfiandri¹, Eko Prasoj², Roy Variant Salomo³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji¹

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia^{2,3}

Email Korespodensi: alfiandi@umrah.ac.id¹

Abstrak

Pendampingan pemangku kepentingan dalam mengelola ekowisata pesisir di Pulau Bintan, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir. Pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan akademisi dalam mengembangkan ekowisata berbasis konservasi, khususnya terkait dengan hutan mangrove yang menjadi salah satu daya tarik utama wisata pesisir di kawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD), pelatihan, dan workshop, yang melibatkan diskusi mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan ekowisata, serta cara-cara untuk mengatasi masalah koordinasi antar pemangku kepentingan, kerusakan lingkungan, dan kurangnya infrastruktur yang mendukung. Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa kesadaran pemangku kepentingan terhadap pentingnya kolaborasi semakin meningkat, dan mereka lebih memahami cara-cara untuk mengelola ekowisata secara berkelanjutan. Pembahasan lebih lanjut mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan yang efektif, seperti pengelolaan mangrove dan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Kesimpulan dari artikel ini menyarankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara semua pihak, serta perlunya edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat merasakan manfaat ekonomi dari ekowisata tanpa merusak lingkungan. Oleh karena itu, kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ekowisata yang menguntungkan dan berkelanjutan di Pulau Bintan.

Catatan Artikel

Dikirim: 12 Desember 2024

Dirivisi: 28 Desember 2024

Diterima: 31 Desember 2024

Kata Kunci

Pendampingan; Pemangku Kepentingan, Tata Kelola, Governansi

 <https://doi.org/10.69812/jpn.v1i1.83>

Artikel akses terbuka di bawah [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam peran serta perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat (Riduwan, 2016). Dalam konteks ini, pengabdian masyarakat tidak hanya berfokus pada penyebaran ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan berbagai konsep pembangunan yang berkelanjutan (Anowar et al., 2011; Idajati et al., 2016). Salah satu contoh nyata pengabdian kepada masyarakat adalah dalam pengembangan wisata berbasis lingkungan yang dijalankan di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Melalui pengelolaan Ekowisata Pesisir, diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat lokal dan menjaga kelestarian lingkungan (Alfiandri et al., 2024).

Beberapa isu strategis terkait pengembangan wisata berbasis lingkungan di Pulau Bintan berdasarkan hasil observasi tim, khususnya terkait dengan pengelolaan hutan mangrove yang menjadi salah satu objek wisata utama di daerah tersebut (Mulyadi et al., 2017). Pulau Bintan yang kaya akan keindahan alamnya, terutama ekosistem mangrove, memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat (Guannel et al., 2016). Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara

optimal karena adanya tantangan dalam tata kelola dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Pada sisi lain, keberadaan hutan mangrove sebagai kawasan konservasi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, pengelolaan mangrove yang berbasis pada prinsip ecotourism (Buckley, 2009; Sharpley, 2008), dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, sangat diperlukan. Namun, untuk mencapai hal ini, keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, serta akademisi, menjadi hal yang sangat krusial. Konsep tata kelola kolaborasi yang diterapkan dalam pengembangan Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan, menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini.

Sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, peran perguruan tinggi dalam Kegiatan ini sangat vital. Pengabdian ini yang berfokus pada kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor bisnis, masyarakat, dan perguruan tinggi ini bertujuan untuk menciptakan model tata kelola yang dapat diterapkan dalam pengembangan wisata berbasis lingkungan (Lathrop & Ruma, 2010; Scott & Boyd, 2020). Dari sisi pemerintah, penerapan kebijakan yang mendukung kolaborasi antar sektor dan pengembangan ekowisata yang berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan (Alfiandri & Irawan, 2023; Alfiandri & Mayarni, 2023; Musa et al., 2020).

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus utama dalam pengembangan wisata berbasis lingkungan ini. Dalam konteks ini, pengembangan ekonomi melalui badan usaha milik desa (BUMDes) yang fokus pada wisata mangrove, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Akbar & Ikhsan, 2019; Anggraini et al., 2022). Program pemberdayaan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami nilai penting dari menjaga kelestarian lingkungan, sambil mengoptimalkan potensi wisata yang ada. Namun, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan bahwa inisiatif ini dapat berkembang dengan baik.

Dalam rangka menciptakan suatu sistem pengelolaan yang berkelanjutan, pengabdian kepada masyarakat ini juga melibatkan akademisi yang dapat memberikan perspektif ilmiah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Perguruan tinggi, melalui Kegiatan dan kajian yang dilakukan, berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di lapangan. Sebagai contoh, hasil-hasil kajian yang berfokus pada pengembangan tata kelola kolaborasi dalam pengelolaan Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan, bertujuan untuk menghasilkan model yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

Secara keseluruhan, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola wisata berbasis lingkungan, tetapi juga untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ekowisata di Pulau Bintan. Melalui kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta tata kelola yang lebih baik, yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga melestarikan kekayaan alam yang ada. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berperan aktif dalam mewujudkan tujuan ini demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang ada.

Pendampingan Pemangku Kepentingan yang diselenggarakan bertujuan untuk memberikan platform bagi pemangku kepentingan dalam mendalami dan memahami konsep governance dalam pengelolaan ekowisata pesisir, khususnya di Pulau Bintan. Melalui FGD ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip tata kelola yang berbasis kolaborasi, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, serta sektor swasta. Pemangku kepentingan akan diberikan pemahaman tentang pentingnya kerjasama antar sektor dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek konservasi lingkungan yang ada di Pulau Bintan.

Selain itu, tujuan Pendampingan ini adalah untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kualitas tata kelola ekowisata pesisir di Pulau Bintan, yang dapat mengoptimalkan potensi alam dan budaya setempat, sembari melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi

kebijakan dan strategi pengelolaan ekowisata, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan.

Metode Pengabdian

Metode pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan dalam program ini berfokus pada pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan akademisi (Gautama et al., 2020). Pendekatan ini dimulai dengan serangkaian kegiatan pendampingan dan fasilitasi yang bertujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai konsep Tata Kelola dalam pengelolaan ekowisata pesisir. Melalui pelatihan, diskusi, dan FGD (Afiyanti, 2008; Schneider et al., 2016), para pemangku kepentingan akan diberi pemahaman mengenai pentingnya kolaborasi antar sektor dalam mengelola sumber daya alam pesisir secara berkelanjutan. Pendampingan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang mendukung pengelolaan ekowisata yang tidak hanya menguntungkan ekonomi masyarakat tetapi juga mempertahankan keberlanjutan lingkungan.

Selanjutnya Para peserta akan dilibatkan dalam berbagai sesi diskusi dan workshop yang berfokus pada identifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam pengelolaan ekowisata pesisir, serta mencari solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan pendekatan ini, setiap aktor dapat memberikan kontribusi berdasarkan keahlian dan perspektifnya masing-masing, menciptakan sebuah model tata kelola yang lebih holistik dan terintegrasi. Pendekatan ini akan mengoptimalkan peran masing-masing pihak dalam pengelolaan ekowisata, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan lokal dan lebih mudah diimplementasikan.

Sebagai bagian dari metode pengabdian ini, evaluasi dan monitoring juga akan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan implementasi hasil diskusi dan kebijakan yang telah disepakati bersama. Para pemangku kepentingan akan diajarkan cara melakukan evaluasi terhadap program ekowisata yang sudah ada serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. Monitoring ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan ekowisata tidak hanya fokus pada pencapaian ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Melalui pengembangan kapasitas dan evaluasi berkelanjutan, pengabdian kepada masyarakat ini akan memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi pengelolaan ekowisata pesisir di Pulau Bintan.

Hasil dan Pembahasan

1. FGD Pemangku Kepentingan Tentang Tata Kelola Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan

a. Sesi Pertama

Pada sesi pertama, FGD dimulai dengan pengenalan dari tim pengabdian yang menjelaskan tujuan kegiatan dan metodologi yang digunakan, termasuk penerapan tata kelola kolaborasi pemerintahan dalam pengembangan ekowisata pesisir di Pulau Bintan. Fokus utama dari kegiatan ini adalah bagaimana mengembangkan proyek ekowisata yang tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor bisnis, akademisi, media massa, dan masyarakat setempat. Salah satu topik utama yang dibahas adalah pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola yang efektif. Kegiatan menjelaskan model pemerintahan Kolaborasi yang didasarkan pada konsep Ansel & Gash, di mana berbagai aktor, seperti pemerintah, bisnis, masyarakat, perguruan tinggi, dan media, bekerja sama untuk mengelola ekowisata secara berkelanjutan dan efektif, tanpa mengabaikan pentingnya nilai sosial dan lingkungan.

Beberapa peserta FGD mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata, seperti konflik lahan, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta dampak ekonomi. Mereka juga mengingatkan tentang kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi, seperti penghancuran mangrove untuk pembangunan, yang mengancam keberlanjutan ekowisata di Pulau Bintan. Diskusi kemudian berfokus pada contoh nyata penerapan ekowisata, terutama yang berbasis pada konservasi mangrove. Beberapa peserta berbagi pengalaman mereka dalam mengembangkan wisata berbasis

mangrove di daerah seperti Tanjungpinang dan Bintan. Mereka membahas tantangan yang mereka hadapi, seperti pengelolaan sampah dan kurangnya dukungan infrastruktur, serta bagaimana pentingnya melibatkan masyarakat dalam menjaga dan merawat ekosistem mangrove.

Peserta dari lembaga pemerintah membahas peran mereka dalam mendukung pengembangan ekowisata berkelanjutan. Mereka menekankan pentingnya kebijakan yang jelas dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Namun, ada kekhawatiran terkait efisiensi birokrasi dan koordinasi yang kurang baik antar lembaga pemerintahan, yang sering menghambat implementasi kebijakan secara efektif. Tema lain yang penting adalah integrasi nilai budaya lokal dalam aktivitas pariwisata. Beberapa peserta dari lembaga budaya dan masyarakat adat menekankan bahwa meskipun manfaat ekonomi dari pariwisata sangat penting, melestarikan budaya lokal dan tradisi masyarakat setempat harus tetap menjadi fokus utama. Hal ini untuk memastikan bahwa pariwisata tidak merusak identitas budaya masyarakat, tetapi justru memperkenalkan kekayaan budaya tersebut kepada wisatawan.



Gambar 1. FGD di Sesi Pertama

Sumber: Tim Pengabdian, 2021

Diskusi ditutup dengan pembahasan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat tata kelola pemerintahan Kolaborasi dan memperbaiki praktik ekowisata. Peserta sepakat bahwa pendekatan yang lebih terintegrasi dan melibatkan dialog berkelanjutan antara semua pihak akan sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi, agar manfaat ekowisata bisa dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, FGD ini memberikan wawasan penting mengenai tantangan dan peluang dalam mengembangkan ekowisata pesisir di Pulau Bintan, serta bagaimana kolaborasi antara pemangku kepentingan dapat mewujudkan ekowisata yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi masyarakat lokal. Hasil diskusi ini akan menjadi referensi untuk disertasi Kegiatan dan kebijakan terkait pariwisata berkelanjutan di masa depan.

b. Sesi Kedua

Hasil FGD (Focus Group Discussion) yang dilaksanakan pada sesi kedua membahas topik Tata Kelola Kolaborasi dalam pembangunan Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan akademisi. Tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk menggali pemahaman dan solusi terkait bagaimana kolaborasi antar berbagai aktor dapat mempercepat pembangunan pariwisata berbasis ekologi di kawasan pesisir. Dalam diskusi ini, para peserta berfokus pada pentingnya peran aktif semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta media dalam membangun destinasi wisata yang berkelanjutan, memelihara keaslian ekosistem, dan membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Para peserta FGD menyoroti tantangan utama dalam pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan, terutama terkait dengan konservasi mangrove. Salah satu narasumber, Andri dari Bintan Resort, mengungkapkan bahwa meskipun hutan mangrove di Lagoi menarik minat wisatawan mancanegara, ada masalah terkait pengrusakan hutan mangrove oleh masyarakat lokal yang kurang memahami cara mengelola sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan. Sebagai solusi, pihak swasta berinisiatif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian mangrove dan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari ekowisata yang dikelola dengan baik.

Kemudian berbagai instansi pemerintah turut menyampaikan pandangan mereka mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan. Sinaga dari Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, misalnya, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir, terutama dalam hal pemberdayaan nelayan tradisional yang bergantung pada ekosistem mangrove. Hal ini sejalan dengan pandangan banyak peserta yang menyarankan agar kebijakan pariwisata berbasis lingkungan harus mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan lainnya yang diangkat dalam FGD ini adalah kurangnya koordinasi antar sektor dan rendahnya tingkat perhatian pemerintah terhadap pengembangan wisata berbasis masyarakat. Meskipun ada beberapa program yang sudah dijalankan, banyak peserta yang merasa bahwa dukungan pemerintah baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten masih belum maksimal. Para pelaku wisata lokal merasa bahwa pengembangan pariwisata yang ada saat ini lebih banyak bersifat formalitas dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat .



Gambar 2. FGD di Sesi Kedua
Sumber: Tim Pengabdian, 2021

Para Peserta FGD menyatakan agar lebih banyak kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah untuk mempromosikan potensi wisata di Pulau Bintan. Salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan wisata yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Bintan Resort, misalnya, menjelaskan bahwa mereka telah berupaya mengedukasi masyarakat untuk tidak merusak hutan mangrove dan memberikan peluang bagi mereka untuk berperan aktif sebagai operator ekowisata. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Terkait dengan hal pemangku kepentingan juga menekankan pentingnya pemanfaatan media massa dan perguruan tinggi dalam menyebarluaskan informasi tentang manfaat konservasi hutan mangrove sebagai bagian dari destinasi wisata. Media diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengedukasi masyarakat dan menarik minat wisatawan, baik domestik maupun internasional, terhadap keunikan dan potensi yang dimiliki oleh Pulau Bintan. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat berperan dalam melakukan riset dan pendampingan untuk

memastikan bahwa pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, FGD ini menghasilkan rekomendasi penting untuk pengembangan Ekowisata Pesisir yang berkelanjutan di Pulau Bintan. Salah satunya adalah perlunya integrasi antara berbagai sektor, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat lokal, sektor swasta, hingga akademisi, dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang berbasis pada prinsip-prinsip kolaborasi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan mangrove, juga dianggap sebagai kunci untuk memastikan keberlanjutan dari pariwisata berbasis lingkungan di kawasan pesisir. Para peserta FGD optimis bahwa dengan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, potensi wisata berbasis ekologi di kawasan pesisir Pulau Bintan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Peningkatan komunikasi, transparansi, serta sinergi antar aktor yang terlibat menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

2. Tantangan dalam Tata Kelola Kolaborasi untuk Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan

Tantangan utama dalam tata kelola Kolaborasi untuk ekowisata di Pulau Bintan terletak pada koordinasi yang kurang baik antar pemangku kepentingan. Dalam kedua sesi FGD, para peserta mengungkapkan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi, namun implementasi kebijakan yang belum efektif sering kali menghambat pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Ketidaksiharian antara kebijakan yang ada dengan kenyataan di lapangan menjadi masalah, terutama dalam hal pengelolaan kawasan pesisir yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu contoh yang disoroti adalah rendahnya tingkat perhatian pemerintah terhadap sektor wisata berbasis masyarakat, meskipun beberapa program telah dijalankan, dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat belum optimal.

Selain itu, pengelolaan sumber daya alam seperti hutan mangrove menghadapi tantangan serius. Meskipun potensi ekowisata berbasis mangrove sangat besar, banyak masyarakat lokal yang belum sepenuhnya memahami cara mengelola dan menjaga keberlanjutan ekosistem ini. Beberapa peserta FGD mengungkapkan bahwa kerusakan mangrove akibat aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dan pembalakan liar, mengancam keberlanjutan ekowisata. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman mengenai pentingnya ekosistem mangrove dan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. Masyarakat lokal sering kali terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam tanpa menyadari dampak negatifnya terhadap ekosistem, sehingga pendidikan dan sosialisasi mengenai pelestarian mangrove menjadi sangat penting.

Infrastruktur yang belum memadai juga menjadi tantangan besar dalam pengembangan ekowisata di Pulau Bintan. Keterbatasan infrastruktur, seperti akses transportasi dan fasilitas pendukung wisata, menghambat perkembangan sektor pariwisata berbasis ekologi. Meskipun Pulau Bintan memiliki potensi alam yang luar biasa, aksesibilitas yang rendah dan kurangnya fasilitas yang ramah lingkungan menjadi kendala bagi wisatawan, baik domestik maupun internasional. Sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan besar seperti Bintan Resort, berusaha memberikan solusi dengan mengedukasi masyarakat lokal dan memperkenalkan model ekowisata yang berbasis pada pelestarian alam.

Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pengembangan ekowisata akan tetap terbatas. Terakhir, tantangan dalam tata kelola Kolaborasi untuk ekowisata di Pulau Bintan juga mencakup masalah sosial dan budaya. Meskipun ada keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari pariwisata, melestarikan budaya lokal dan tradisi masyarakat setempat harus tetap menjadi prioritas. Beberapa peserta FGD menekankan pentingnya menjaga identitas budaya masyarakat agar pariwisata tidak merusak nilai-nilai tersebut. Integrasi nilai budaya dalam ekowisata menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dari sisi sosial dan budaya. Kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk lembaga budaya dan masyarakat adat, perlu diperkuat agar pariwisata dapat menjadi sarana yang memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada dunia, tanpa mengabaikan pentingnya pelestarian budaya tersebut.

3. Peran Komunitas Lokal dalam Tata Kelola Kolaborasi untuk Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan

Peran komunitas lokal dalam tata kelola kolaborasi untuk ekowisata pesisir di Pulau Bintan sangat penting dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam berbagai sesi FGD yang diadakan, para peserta menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat setempat dalam mengelola ekosistem pesisir, khususnya dalam konservasi mangrove yang menjadi salah satu daya tarik utama ekowisata di kawasan tersebut. Komunitas lokal, terutama nelayan tradisional yang bergantung pada ekosistem mangrove, diharapkan dapat lebih aktif dalam menjaga kelestarian alam. Keterlibatan mereka tidak hanya berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan mereka manfaat ekonomi langsung dari pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. Sehingga, dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga alam, masyarakat lokal dapat merasakan keuntungan jangka panjang yang berasal dari ekowisata, tanpa harus mengorbankan keberlanjutan alam.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan juga sangat penting dalam memperkuat peran komunitas lokal. FGD menunjukkan bahwa beberapa pihak swasta, seperti Bintan Resort, telah berinisiatif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian mangrove dan dampak positif yang bisa didapatkan dari ekowisata yang berbasis pada pelestarian lingkungan. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat menyadari potensi ekonomi yang terkandung dalam pengelolaan alam secara berkelanjutan, seperti pengembangan wisata berbasis alam yang memanfaatkan keindahan hutan mangrove. Ini memberikan mereka alternatif ekonomi yang dapat mendukung kesejahteraan mereka tanpa merusak lingkungan yang mereka andalkan.

Dalam konteks kolaborasi antar pemangku kepentingan, peran komunitas lokal juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan sinergi yang efektif antara sektor swasta, pemerintah, dan akademisi. Komunitas lokal di Pulau Bintan berfungsi sebagai penghubung antara berbagai aktor tersebut, memberikan perspektif lokal yang sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang berbasis pada keberlanjutan. Mereka dapat memberikan informasi yang berharga terkait kondisi alam dan sosial yang ada, yang dapat membantu sektor-sektor lain dalam merencanakan pengembangan ekowisata yang lebih tepat sasaran. Melalui kolaborasi ini, semua pihak bisa bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara konservasi alam dan pemberdayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, komunitas lokal memiliki peran ganda dalam tata kelola kolaborasi ekowisata pesisir di Pulau Bintan, yaitu sebagai pelestari lingkungan dan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan ekowisata. Dengan meningkatkan kapasitas mereka, baik melalui edukasi, pelatihan, maupun pemberdayaan ekonomi, komunitas lokal dapat menjadi motor penggerak keberlanjutan ekowisata di kawasan pesisir. Para peserta FGD sepakat bahwa tanpa peran aktif masyarakat setempat, ekowisata berbasis lingkungan di Pulau Bintan akan kesulitan untuk berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama yang erat dan berkelanjutan antara semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan ekowisata yang menguntungkan bagi lingkungan dan masyarakat.

Kesimpulan

Kesimpulan dari Focus Group Discussion (FGD) mengenai tata kelola ekowisata pesisir di Pulau Bintan menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan akademisi, sangat penting dalam mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan. Dalam kedua sesi FGD, disepakati bahwa tata kelola Kolaborasi yang melibatkan semua pihak secara aktif dapat mempercepat pengembangan ekowisata, mengingat potensi besar yang dimiliki Pulau Bintan, terutama dalam hal konservasi mangrove dan pelestarian lingkungan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah koordinasi yang kurang baik antara pemangku kepentingan serta kurangnya perhatian yang maksimal dari pemerintah terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Tantangan lainnya yang mencuat dalam diskusi adalah kerusakan lingkungan, terutama pengrusakan hutan mangrove oleh masyarakat yang kurang memahami pentingnya keberlanjutan

ekosistem ini. Meskipun sektor swasta, seperti Bintan Resort, telah berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian mangrove, pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan masih terhambat oleh rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan yang terstruktur menjadi kunci dalam membangun kesadaran masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan potensi ekowisata tanpa merusak alam.

Pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat setempat perlu diperkuat melalui kolaborasi yang lebih erat antara sektor swasta, pemerintah, dan akademisi. Kolaborasi yang baik akan memungkinkan pengembangan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal dan keberlanjutan jangka panjang ekowisata. Komunitas lokal, khususnya nelayan tradisional, memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sekaligus merasakan manfaat ekonomi dari ekowisata. Melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas mereka, masyarakat setempat dapat menjadi aktor utama dalam keberhasilan ekowisata di Pulau Bintan.

Tata kelola Kolaborasi dalam pengembangan ekowisata pesisir di Pulau Bintan memerlukan sinergi yang kuat antara semua pihak. Hanya dengan kolaborasi yang berkelanjutan, pengelolaan ekowisata dapat berjalan dengan baik, menguntungkan bagi masyarakat lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, seperti pengelolaan mangrove, infrastruktur yang belum memadai, dan kesenjangan koordinasi antar sektor, untuk menciptakan ekowisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan kegiatan pendampingan ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan potensi pengelolaan ekowisata pesisir di Pulau Bintan, serta kepada para pemangku kepentingan yang telah aktif berdiskusi dan memberikan masukan konstruktif. Tidak lupa, kami menyampaikan apresiasi kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji dan LP3M yang telah mendukung kelancaran acara ini. Semoga hasil dari diskusi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan tata kelola pariwisata berbasis lingkungan di Pulau Bintan, serta memperkuat kolaborasi antar stakeholder untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Daftar Pustaka

- Afiyanti, Y. (2008). Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 58–62. <https://doi.org/10.7454/JKI.V12I1.201>
- Akbar, D., & Ikhsan, K. (2019). Public-Private Partnership Dalam Pengoptimalan Wisata Bintan Mangrove. *Metacommunication: Journal of Communication Studies*, 4(1), 128–136. <https://doi.org/10.20527/MC.V4I1.6358>
- Alfiandri, A., & Irawan, B. (2023). Collaborative Governance in Mangrove Ecotourism Policy on Bintan Island Coastal Approach of Penta Helix. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 7(1), 171–191. <https://doi.org/10.24198/JMPP.V7I1.49066>
- Alfiandri, A., & Mayarni, M. (2023). Implementation Model of Governance Policy for Developing Coastal Border Ecotourism in Indonesia. *BIO Web of Conferences*, 70, 04005. <https://doi.org/10.1051/BIOCONF/20237004005>
- Alfiandri, A., Prasojo, E., Salomo, R. V., & Wicaksono, A. (2024). Beyond Volatility: Harnessing VUCA Methodology for Sustainable Collaboration in Bintan Island's Mangrove Ecotourism Governance. *Danube*, 15(2), 166–187. <https://doi.org/10.2478/DANB-2024-0010>

- Anggraini, R., Syakti, A. D., Idris, F., Febrianto, T., Wirayuhanto, H., & Suhana, M. P. (2022). Pengenalan Konsep Eko-eduwisata Mangrove di Desa Wisata Pengudang Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 8(1), 18–23. <https://doi.org/10.21107/PANGABDHI.V8I1.12463>
- Anowar, M., Bhuiyan, H., & Islam, R. (2011). The Role of Government for Ecotourism Development: Focusing on East Coast Economic Region . *Journal of Social Sciences*, 7(4), 557–564. <https://www.researchgate.net/publication/235660250>
- Buckley, R. (2009). Ecotourism: Principles and Practices. In *Tourism Management*. CABI.
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355–369. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>
- Guannel, G., Arkema, K., Ruggiero, P., & Verutes, G. (2016). The Power of Three: Coral Reefs, Seagrasses and Mangroves Protect Coastal Regions and Increase Their Resilience. *PLOS ONE*, 11(7), e0158094. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0158094>
- Idajati, H., Pamungkas, A., & Vely Kukinul, S. (2016). The Level of Participation in Mangrove Ecotourism Development, Wonorejo Surabaya. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227, 515–520. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2016.06.109>
- Lathrop, D., & Ruma, L. (2010). Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice. In *Open government: Transparency, collaboration, and participation in practice*. O'Reilly Media.
- Mulyadi, A., Yoswaty, D., & Ilahi, I. (2017). Dampak lingkungan dari pengembangan ekowisata bahari di kawasan konservasi lamun Trikora, Bintan, Kepulauan Riau. *Berkala Perikanan Terubuk*, 45(1), 95–111. <https://doi.org/10.31258/TERUBUK.45.1.95>
- Musa, F., Fozi, N. M., Demiyah, D., & Hamdan, M. (2020). Coastal communities' willingness to pay for mangrove ecotourism in Marudu Bay, Sabah, Malaysia. *Journal of Sustainability Science and Management*, 130–140. <https://doi.org/10.46754/jssm.2020.06.013>
- Riduwan, A. (2016). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 95–108.
- Schneider, S. J., Kerwin, J., Frechtling, J., & Vivari, B. A. (2016). Characteristics of the Discussion in Online and Face-to-Face Focus Groups: *Social Science Computer Review*, 20(1), 31–42. <https://doi.org/10.1177/089443930202000104>
- Scott, R. J., & Boyd, R. (2020). Determined to succeed: Can goal commitment sustain interagency collaboration? *Public Policy and Administration*, 095207672090500. <https://doi.org/10.1177/0952076720905002>
- Sharpley, R. (2008). Ecotourism: A Consumption Perspective. *Journal of Ecotourism*, 5(1–2), 7–22. <https://doi.org/10.1080/14724040608668444>



Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); Studi SDN 013 Tanjungpinang Barat. Kota Tanjungpinang

Desy Yunasti¹, Asparyana Asparyana²

Kader Pos Pelayanan Terpadu Ananda (POSYANDU) Ananda Tanjungpinang Barat¹
Divisi Hubungan Masyarakat. Austronesia Akademika²

Email Korespondensi: riyanaaspa@gmail.com¹

Abstrak

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan PHBS kepada siswa di Sekolah Dasar Negeri 013 Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan kesehatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan praktek langsung, seperti cara mencuci tangan yang benar, menjaga kebersihan lingkungan, serta penyuluhan tentang pola makan sehat dan pembuangan sampah yang tepat. Kegiatan ini berlangsung selama enam bulan dari bulan April hingga November 2023, melibatkan siswa, guru, dan masyarakat setempat. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran di kalangan siswa dan masyarakat mengenai pentingnya PHBS. Siswa mulai lebih memperhatikan kebersihan pribadi dan lingkungan sekitar, seperti membuang sampah pada tempatnya dan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Selain itu, siswa juga menunjukkan peningkatan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan keluarga mereka. Kegiatan ini juga berdampak positif pada peningkatan kesehatan siswa dan keluarga, mengurangi risiko penyebaran penyakit yang dapat ditularkan melalui kebersihan yang kurang terjaga. Kesimpulannya, sosialisasi PHBS di SDN 013 Tanjungpinang Barat berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta mendorong perubahan perilaku menuju hidup sehat. Untuk kelanjutan program ini, direkomendasikan agar pihak sekolah terus memberikan pembinaan dan menyediakan fasilitas yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, seperti tempat cuci tangan yang memadai dan program kebersihan lingkungan yang berkelanjutan.

Catatan Artikel

Dikirim: 15 Desember 2024
Dirivisi: 29 Desember 2024
Diterima: 31 Desember 2024

Kata Kunci

Sosialisasi; PHBS; Sekolah Dasar

 <https://doi.org/10.69812/jpn.v1i1.84>

Artikel akses terbuka di bawah [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. PHBS tidak hanya berkaitan dengan kebersihan fisik, tetapi juga mencakup pola makan sehat, kegiatan fisik yang teratur, serta kebiasaan menjaga kesehatan mental (Mustar et al., 2018; Nurhidayah et al., 2021). Salah satu aspek utama dalam PHBS adalah kebersihan diri dan lingkungan. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan rumah dan tempat umum, serta membuang sampah pada tempatnya menjadi landasan dari gerakan PHBS (Aminah et al., 2021; Candrawati & Widiani, 2015). Masyarakat yang menerapkan perilaku ini berperan aktif dalam pencegahan berbagai penyakit yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau lingkungan yang kotor.

Selain itu, pentingnya konsumsi makanan bergizi menjadi perhatian dalam PHBS. Masyarakat di Indonesia diajak untuk mengurangi konsumsi makanan yang mengandung banyak lemak, gula, dan garam, serta lebih memilih makanan yang sehat dan bergizi (Chandra et al., 2017; Luthfia, 2021).

Pemerintah melalui berbagai kampanye kesehatan berusaha untuk mengedukasi masyarakat mengenai pola makan yang seimbang, serta pentingnya hidrasi dengan minum air putih yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga atau aktivitas fisik juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PHBS. Dengan rutin berolahraga, masyarakat dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, dan obesitas, serta menjaga keseimbangan mental (Aminah et al., 2021; Anhusadar & Islamiyah, 2020).

Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat juga sangat bergantung pada kesadaran dan edukasi masyarakat itu sendiri (Nurhajati, 2015). Pemerintah Indonesia melalui berbagai program, seperti program kesehatan di sekolah-sekolah dan kampanye media, berusaha menyadarkan masyarakat akan pentingnya PHBS. Meski demikian, tantangan dalam penerapannya masih cukup besar, terutama di daerah pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan dan informasi (Aulina & Astutik, 2019; Rofiki & Famuji, 2020). Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat, dukungan dari sektor swasta, dan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting untuk mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat, agar Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif (Khaldun, 2020; Yunika et al., 2022).

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah salah satu pilar utama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi beban penyakit, PHBS menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi anak-anak di lingkungan sekolah dasar (Julianti et al., 2018; Nurmahmudah et al., 2018). Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional di Indonesia yang menekankan pentingnya pendidikan kesehatan di sekolah-sekolah, sebagai salah satu sarana untuk membangun budaya hidup sehat pada generasi muda. Pada tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) 013 Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, masih ditemukan kesenjangan pemahaman tentang PHBS, baik di kalangan siswa maupun guru, yang mengarah pada kurangnya implementasi kebiasaan sehat dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Urgensi pengabdian kepada masyarakat ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk mengubah perilaku hidup anak-anak di lingkungan sekolah yang dapat berdampak langsung pada kualitas kesehatan mereka. Sebagaimana diketahui, PHBS mencakup berbagai tindakan sederhana namun vital, seperti mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, mengonsumsi makanan sehat, serta memastikan lingkungan sekolah yang bebas dari sampah dan kuman. Tanpa pengenalan dan pembiasaan terhadap PHBS sejak dini, anak-anak cenderung berkembang dalam lingkungan yang tidak mendukung kesehatan mereka secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan pelatihan yang dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan pentingnya menerapkan PHBS di sekolah dan di rumah.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra pengabdian ini terletak pada kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait PHBS di kalangan siswa dan masyarakat sekolah. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa siswa masih belum terbiasa menerapkan kebiasaan-kebiasaan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak di antara mereka yang tidak mencuci tangan dengan benar, membuang sampah sembarangan, atau tidak menjaga kebersihan diri setelah melakukan aktivitas tertentu. Selain itu, pihak sekolah juga belum memiliki program atau kebijakan yang secara terstruktur mengedukasi siswa tentang pentingnya PHBS. Kondisi ini memperburuk kualitas hidup mereka dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit di lingkungan sekolah.

Namun, SDN 013 Tanjungpinang Barat memiliki potensi besar untuk mengembangkan budaya PHBS dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah, mulai dari siswa, guru, hingga orang tua. Sekolah ini memiliki akses yang cukup baik terhadap berbagai fasilitas dasar, seperti ruang kelas yang memadai, dan dukungan dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. Selain itu, guru-guru di SDN 013 Tanjungpinang Barat memiliki komitmen yang tinggi terhadap perkembangan siswa, meskipun mereka masih membutuhkan bimbingan lebih lanjut tentang bagaimana mengintegrasikan PHBS ke dalam kegiatan belajar mengajar secara efektif. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi permasalahan yang ada sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh sekolah.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, terutama siswa dan guru di SDN 013 Tanjungpinang Barat, mengenai pentingnya PHBS. Melalui serangkaian sosialisasi, pelatihan, dan praktek langsung, siswa akan diberikan wawasan mengenai cara-cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang benar. Di samping itu, guru juga akan dilibatkan dalam pelatihan agar dapat memberikan contoh yang baik dan menjadi agen perubahan dalam mengajarkan PHBS kepada siswa. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan siswa dapat mengaplikasikan perilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari mereka, baik di sekolah maupun di rumah.

Melalui pengabdian ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan sekolah yang lebih sehat, dengan siswa yang lebih peduli terhadap kebersihan diri dan lingkungannya. Proses pembelajaran yang melibatkan elemen praktis seperti mencuci tangan dengan benar dan pengelolaan sampah yang baik, akan memberikan dampak positif tidak hanya pada kesehatan fisik siswa, tetapi juga pada penguatan karakter mereka. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang, dengan terwujudnya kebiasaan PHBS yang diterapkan oleh siswa secara mandiri di kehidupan mereka, baik di sekolah maupun di rumah.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi orang tua mengenai pentingnya mendukung kebiasaan PHBS anak-anak mereka di rumah. Oleh karena itu, sosialisasi yang melibatkan orang tua dalam bentuk pertemuan dan kegiatan bersama akan menjadi bagian integral dari program ini. Dengan melibatkan orang tua, diharapkan dapat tercipta sinergi antara sekolah dan rumah dalam membentuk karakter anak yang sehat dan bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan mereka. Secara umum kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan untuk memberikan edukasi yang komprehensif mengenai PHBS, dengan pendekatan yang tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga dilengkapi dengan praktik yang relevan. Melalui pendekatan ini, diharapkan PHBS akan menjadi bagian dari budaya sekolah yang terus berkembang, memberikan manfaat kesehatan yang berkelanjutan bagi siswa dan masyarakat di SDN 013 Tanjungpinang Barat. Dengan begitu, sekolah ini dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam menerapkan kebijakan PHBS yang efektif dan berkelanjutan.

Metode Pengabdian

Metode Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diterapkan dalam kegiatan ini melibatkan beberapa tahap penting untuk memastikan keberhasilan implementasi program (Haryono et al., 2024). Pada tahap awal, dilakukan observasi lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dalam hal ini terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di kalangan siswa SDN 013 Tanjungpinang. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyuluhan yang mencakup ceramah, diskusi (brainstorming), serta praktik langsung oleh siswa (Rickards, 1999). Penyuluhan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, terutama siswa, tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, serta memberikan keterampilan praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengabdian juga melibatkan kegiatan langsung seperti praktek mencuci tangan dan sikat gigi yang benar, yang diikuti oleh siswa. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mendapatkan teori tentang PHBS, tetapi juga pengalaman langsung dalam melaksanakan perilaku tersebut.

Pendekatan praktis ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan tidak hanya dipahami, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Metode ini juga melibatkan pemanfaatan alat peraga seperti proyektor dan buku saku modul PHBS untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Selain kegiatan penyuluhan, juga dilakukan pembentukan kelompok-kelompok kecil di kalangan siswa untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Hal ini juga bertujuan untuk mengembangkan budaya hidup bersih dan sehat di kalangan siswa yang dapat terus diterapkan baik di sekolah maupun

di rumah. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan pengabdian untuk mengukur sejauh mana dampak yang dihasilkan, dengan fokus pada perubahan perilaku siswa dan tingkat penerapan PHBS dalam kehidupan mereka .

Hasil dan Pembahasan

1. Evaluasi Tingkat Pemahaman Siswa tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap siswa mengenai pemahaman mereka tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terdapat beberapa temuan yang mencerminkan sejauh mana siswa telah memahami pentingnya menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas siswa memahami konsep dasar PHBS, seperti mencuci tangan dengan sabun, membuang sampah pada tempatnya, serta pentingnya menjaga kebersihan tubuh. Namun, masih ada beberapa siswa yang belum sepenuhnya memahami penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama dalam aspek seperti pengelolaan sampah rumah tangga dan pentingnya pola makan sehat yang seimbang.

Selain itu, evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengetahui pentingnya mencuci tangan sebelum makan dan setelah buang air besar, yang merupakan salah satu indikator penting dari perilaku hidup bersih. Meski begitu, dalam penerapannya, ada beberapa siswa yang terkadang mengabaikan kebiasaan tersebut di luar lingkungan sekolah. Ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman tentang PHBS cukup baik, kedisiplinan dalam menjalankan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari masih perlu diperkuat, baik melalui pendidikan lanjutan di sekolah maupun pengawasan dari orang tua di rumah.

Pada aspek penting lainnya, yaitu tentang kebersihan lingkungan, hasil evaluasi mengungkapkan bahwa hampir semua siswa memahami pentingnya menjaga kebersihan di sekitar mereka, seperti membersihkan ruang kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Namun, ketika diminta untuk menjelaskan cara-cara lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah dan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, sebagian besar siswa terlihat kurang tahu dan cenderung menganggap sampah sebagai hal yang tidak terlalu penting untuk dikelola dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya penambahan materi terkait pengelolaan sampah yang lebih mendalam dalam kurikulum pendidikan kesehatan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun siswa sudah memahami sebagian besar konsep PHBS, pemahaman mereka tentang pola makan sehat dan gizi seimbang masih tergolong rendah. Hanya sebagian kecil siswa yang mampu menjelaskan dengan benar tentang pentingnya mengonsumsi makanan bergizi dan memperhatikan porsi makan yang tepat. Ini mengindikasikan bahwa pendidikan tentang gizi dan pola makan sehat perlu mendapat perhatian lebih dalam evaluasi selanjutnya. Beberapa siswa menganggap bahwa pola makan sehat hanya berkaitan dengan konsumsi sayuran, tanpa memperhatikan keseimbangan antara karbohidrat, protein, lemak, serta konsumsi air yang cukup.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penerapan PHBS di kalangan siswa, evaluasi ini menunjukkan bahwa perlu adanya program-program lanjutan yang lebih intensif baik di sekolah maupun di masyarakat. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan melibatkan siswa dalam kegiatan yang langsung berkaitan dengan PHBS, seperti program pengelolaan sampah di sekolah atau penyuluhan gizi yang melibatkan praktisi kesehatan. Selain itu, peningkatan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam memberikan contoh dan mendidik siswa tentang perilaku hidup bersih dan sehat menjadi sangat penting untuk membentuk kebiasaan yang sehat dan berkelanjutan di masa depan.

2. Analisis Implementasi PHBS di SDN 013 Tanjungpinang Barat

Implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di SDN 013 Tanjungpinang Barat menunjukkan beberapa temuan yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan di lingkungan sekolah. Salah satu temuan utama adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran

tentang PHBS di kalangan siswa dan guru. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk lebih intensif dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya kebersihan dan kesehatan. Selain itu, banyak siswa yang belum menerapkan kebiasaan dasar seperti mencuci tangan dengan benar atau menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kegiatan sosialisasi PHBS yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan pelatihan tentang cara-cara hidup sehat, serta meningkatkan kesadaran mengenai dampak buruk dari perilaku hidup tidak sehat di sekolah ini juga menghadapi tantangan berupa kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, seperti fasilitas cuci tangan, toilet yang bersih, dan tempat sampah yang terorganisir. Kurangnya fasilitas ini menghambat siswa untuk secara rutin menerapkan prinsip-prinsip PHBS. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa fasilitas sanitasi yang tidak memadai adalah salah satu hambatan utama dalam penerapan PHBS di sekolah-sekolah dasar. Oleh karena itu, kerja sama antara pihak sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada agar mendukung implementasi PHBS secara efektif.



Gambar 1. Peragaan PHBS di tunjukan kepada Siswa
Sumber: Tim PKM, 2023

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada siswa tentang cara mencuci tangan yang benar dan menjaga kebersihan diri. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, seperti dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan toilet. Melalui pelatihan ini, diharapkan siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman kebiasaan sehat ini sangat penting, mengingat bahwa kebiasaan yang diterapkan sejak dini akan berpengaruh besar pada kesehatan mereka di masa depan.

Dalam pembahasan ini, terlihat bahwa ada peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai PHBS di kalangan siswa dan orang tua. Mereka mulai menerapkan kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan pribadi, serta membuang sampah pada tempatnya. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan berhasil menciptakan perubahan perilaku yang positif di tingkat individu dan lingkungan sekolah. Namun, perubahan ini harus terus dipelihara ogram-program lanjutan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kebiasaan hidup sehat terus diterapkan dengan baik. Akhirnya, untuk memastikan keberlanjutan program PHBS di SDN 013 Tanjungpinang Barat, sangat penting untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam implementasinya, termasuk orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung penerapan PHBS.

3. Perubahan Perilaku Siswa dalam Penerapan PHBS

Penerapan program PHBS di SDN 013 Tanjungpinang menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran siswa terkait pentingnya kebersihan dan kesehatan. Sebelum

program dilaksanakan, banyak siswa dan orang tua yang kurang memahami prinsip dasar PHBS, seperti mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan diri, dan menjaga kebersihan lingkungan. Setelah mengikuti sosialisasi dan pelatihan, terdapat peningkatan kesadaran yang cukup tinggi. Siswa mulai memahami pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah.

Keterampilan siswa dalam melaksanakan PHBS juga mengalami peningkatan setelah kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Siswa diajarkan cara mencuci tangan yang benar, cara menjaga kebersihan lingkungan, serta cara menjaga kebersihan diri. Hal ini diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kebersihan toilet dan area sekitar. Peningkatan keterampilan ini memberikan dampak langsung terhadap kebersihan lingkungan sekolah yang lebih terjagaampak Positif terhadap Kesehatan. Implementasi PHBS yang lebih baik di SDN 013 Tanjungpinang juga berpengaruh pada peningkatan kualitas kesehatan siswa dan keluarga mereka. Dengan mengadopsi kebiasaan seperti mencuci tangan dengan benar dan menjaga kebersihan lingkungan, siswa menjadi lebih tahan terhadap berbagai penyakit menular. Selain itu, keluarga mereka juga mulai lebih memperhatikan pola hidup sehat, yang tercermin dalam cara mereka menjaga kebersihan rumah dan memilih makanan sehat. Program ini membantu menurunkan angka penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman, baik di sekolah maupun di rumah.



Gambar 1. TIM PKM Memberikan Famplet Edukasi PHBS
Sumber: Tim PKM, 2023

Salah satu dampak yang paling mencolok adalah peningkatan kemandirian siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sebelumnya, siswa lebih bergantung pada guru dan staf sekolah untuk menjaga kebersihan. Namun, setelah mendapatkan edukasi tentang PHBS, siswa menjadi lebih proaktif dalam membersihkan lingkungan mereka sendiri, seperti membersihkan kelas, halaman, dan toilet. Mereka juga mulai mengingatkan teman-temannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal ini menunjukkan adanya perubahan perilaku yang sangat positif dalam hal menjaga kebersihan sekolah. Perubahan perilaku siswa dalam menerapkan PHBS tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di rumah. Sosialisasi yang dilakukan kepada orang tua turut meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya mendukung perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Orang tua yang sebelumnya kurang mendalami pentingnya PHBS, kini mulai mengajarkan anak-anak mereka untuk menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan.

4. Dampak Sosialisasi PHBS terhadap Lingkungan Sekolah dan Keluarga Siswa

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan di SDN 013 Tanjungpinang, dampak sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terhadap lingkungan sekolah dan keluarga siswa

terlihat signifikan. Secara umum, kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan siswa dan orang tua mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelum kegiatan sosialisasi, masih banyak siswa dan orang tua yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, setelah adanya program ini, mereka mulai menyadari betapa pentingnya kebiasaan-kebiasaan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, menjaga kebersihan diri, serta membuang sampah pada tempatnya itu, perubahan dalam perilaku siswa sangat terlihat. Siswa mulai lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Mereka tidak hanya menjaga kebersihan kelas, tetapi juga memperhatikan kebersihan halaman sekolah dan fasilitas umum lainnya, seperti toilet. Mereka juga mulai terlibat dalam kegiatan pembersihan lingkungan secara rutin. Kemandirian siswa dalam menerapkan PHBS di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa mereka sudah mulai menginternalisasi nilai-nilai kebersihan yang diajarkan selama sosialisasi.

Dalam sosialisasi PHBS juga memberikan dampak positif. Orang tua yang sebelumnya kurang teredukasi tentang cara menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah, mulai menerapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga. Mereka mulai memperhatikan kebersihan rumah dan memastikan anak-anak mereka menerapkan kebiasaan sehat yang sudah diajarkan di sekolah. Selain itu, keluarga juga ikut berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar mereka, menciptakan suasana yang lebih sehat untuk anak-anak mereka tumbuh dan berkembang. Namun, meskipun ada dampak, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu dihadapi, seperti kurangnya fasilitas sanitasi yang memadai di beberapa sekolah dan ketidaksiapan beberapa siswa dan orang tua dalam menerapkan PHBS secara konsisten.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan sudah meningkat, kebiasaan sehat tersebut perlu terus didorong melalui program-program yang terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan peningkatan fasilitas sanitasi di lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program PHBS jangka panjang. Secara keseluruhan, dampak sosialisasi PHBS di lingkungan sekolah dan keluarga siswa memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan kebersihan. Namun, upaya ini harus terus dilanjutkan dengan melibatkan semua pihak, baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka.

5. Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan PHBS di Sekolah Dasar

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan di SDN 013 Tanjungpinang, dampak sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terhadap lingkungan sekolah dan keluarga siswa terlihat signifikan. Secara umum, kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan siswa dan orang tua mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelum kegiatan sosialisasi, masih banyak siswa dan orang tua yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, setelah adanya program ini, mereka mulai menyadari betapa pentingnya kebiasaan-kebiasaan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, menjaga kebersihan diri, serta membuang sampah pada tempatnya itu, perubahan dalam perilaku siswa sangat terlihat. Siswa mulai lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Mereka tidak hanya menjaga kebersihan kelas, tetapi juga memperhatikan kebersihan halaman sekolah dan fasilitas umum lainnya, seperti toilet. Mereka juga mulai terlibat dalam kegiatan pembersihan lingkungan secara rutin. Kemandirian siswa dalam menerapkan PHBS di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa mereka sudah mulai menginternalisasi nilai-nilai kebersihan yang diajarkan selama sosialisasi.

Dalam sosialisasi PHBS juga memberikan dampak positif. Orang tua yang sebelumnya kurang teredukasi tentang cara menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah, mulai menerapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga. Mereka mulai memperhatikan kebersihan rumah dan memastikan anak-anak mereka menerapkan kebiasaan sehat yang sudah diajarkan di sekolah. Selain itu, keluarga juga ikut berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar mereka, menciptakan suasana yang lebih sehat untuk anak-anak mereka tumbuh dan berkembang. Namun, meskipun ada dampak, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu dihadapi, seperti kurangnya fasilitas sanitasi yang

memadai di beberapa sekolah dan ketidakbiasaan beberapa siswa dan orang tua dalam menerapkan PHBS secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan sudah meningkat, kebiasaan sehat tersebut perlu terus didorong melalui program-program yang terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengawasan yang dan peningkatan fasilitas sanitasi di lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program PHBS jangka panjang. Secara keseluruhan, dampak sosialisasi PHBS di lingkungan sekolah dan keluarga siswa memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan kebersihan. Namun, upaya ini harus terus dilanjutkan dengan melibatkan semua pihak, baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka.

Kesimpulan

Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di SDN 013 Tanjungpinang Barat menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya kebersihan dan kesehatan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat lebih lanjut. Mayoritas siswa sudah memahami konsep dasar PHBS seperti mencuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan, namun implementasi kebiasaan tersebut di luar sekolah masih belum sepenuhnya konsisten. Kurangnya pengetahuan mendalam mengenai pengelolaan sampah dan pola makan sehat menunjukkan bahwa ada ruang yang cukup besar untuk memperluas materi pembelajaran di sekolah dan memperkuat pengawasan serta kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam membentuk kebiasaan sehat yang berkelanjutan.

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan PHBS di sekolah juga tidak dapat diabaikan. Faktor utama yang menghambat implementasi adalah keterbatasan fasilitas sanitasi yang memadai, seperti tempat cuci tangan dan toilet yang bersih. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, siswa kesulitan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang lebih intensif antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam menyediakan fasilitas yang mendukung penerapan PHBS secara efektif. Selain itu, meskipun pengetahuan mengenai PHBS sudah meningkat, keberlanjutan program ini harus tetap didorong melalui program-program yang terstruktur dan evaluasi berkala untuk memastikan kebiasaan sehat tersebut menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari siswa, keluarga, dan masyarakat.

Dampak positif dari sosialisasi PHBS terhadap lingkungan sekolah dan keluarga siswa terlihat signifikan, dengan adanya perubahan perilaku siswa dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Program ini tidak hanya meningkatkan kebersihan di lingkungan sekolah, tetapi juga berdampak pada perilaku keluarga yang lebih peduli terhadap kebersihan rumah dan pola makan sehat. Keterlibatan orang tua dalam mendukung kebiasaan sehat di rumah memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan program ini. Namun, untuk memastikan keberlanjutan program PHBS, pengawasan yang lebih intensif dan peningkatan fasilitas sanitasi di lingkungan sekolah sangat diperlukan.

Ucapan Terima Kasih

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Terutama kepada SDN 013 Tanjungpinang Barat yang telah membuka pintu untuk kami dalam melakukan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta kepada semua guru dan siswa yang telah aktif berpartisipasi dan menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Kami juga sangat berterima kasih kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji dan LPPM UMRAH yang telah memberikan dana hibah serta dukungan logistik untuk kelancaran kegiatan ini. Tanpa kerjasama yang solid antara pihak sekolah, masyarakat, dan tim pengabdian, program ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesehatan dan kebersihan di lingkungan sekolah dan sekitar, serta menjadi langkah awal yang positif untuk budaya hidup sehat di masa depan.

Daftar Pustaka

- Aminah, S., Huliaturisa, Y., & Magdalena, I. (2021). Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Untuk Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal JKFT*, 6(1), 18–28. <https://doi.org/10.31000/JKFT.V6I1.5214>
- Anhusadar, L., & Islamiyah, I. (2020). Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat Anak Usia Dini di tengah pandemi Covid 19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 463–475. <https://doi.org/10.31004/OBSESI.V5I1.555>
- Aulina, C., & Astutik, Y. (2019). Peningkatan Kesehatan Anak Usia Dini dengan Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di TK Kecamatan Candi Sidoarjo. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 50–58. <https://doi.org/10.30651/AKS.V3I1.1480>
- Candrawati, E., & Widiani, E. (2015). Pelaksanaan Program UKS Dengan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Siswa Sekolah Dasar Di Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. *Care : Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.33366/JC.V3I1.299>
- Chandra, C., Fauzan, A., & Aquarista, M. F. (2017). Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Dengan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Siswa Sekolah Dasar (SD) Di Kecamatan Cerbon Tahun 2016. *Jurnal Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Khatulistiwa*, 4(3), 201–205. <https://doi.org/10.29406/JKMK.V4I3.849>
- Haryono, E., Murtaqi, Moch. R. Al, Izzah, A. N. L., Septian, D., & Sariman, S. (2024). Metode-Metode Pelaksanaan PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat) Untuk Perguruan Tinggi. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 5(02), 1–21. <https://doi.org/10.1989/B4EJQB56>
- Julianti, R., Nasirun, M., & Wembrayarli, W. (2018). Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 3(2), 76–82. <https://doi.org/10.33369/JIP.3.2.76-82>
- Khaldun, U. (2020). Edukasi PHBS di Tatanan Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Perilaku Sehat. *Jurnal Abdidas*, 1(2), 28–32. <https://doi.org/10.31004/ABDIDAS.V1I2.9>
- Luthfia, Y. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Tatanan Sekolah Pada Siswa Sekolah Dasar Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Indonesia (JIKMI)*, 2(1), 1–11. <http://www.jurnal.umitra.ac.id/index.php/jikmi/article/view/599>
- Mustar, Y. S., Susanto, I. H., & Bakti, A. P. (2018). Pendidikan Kesehatan: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah Dasar. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 2(2). <https://doi.org/10.58258/JISIP.V2I2.359>
- Nurhajati, N. (2015). Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Masyarakat Desa Samir Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat. *Publiciana*, 8(1), 107–126. <https://doi.org/10.36563/PUBLICIANA.V8I1.43>
- Nurhidayah, I., Asifah, L., & Rosidin, U. (2021). Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Siswa Sekolah Dasar. *The Indonesian Journal of Health Science*, 13(1), 61–71. <https://doi.org/10.32528/IJHS.V13I1.4864>
- Nurmahmudah, E., Puspitasari, T., & Agustin, I. T. (2018). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pada Anak Sekolah. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 46–52. <https://doi.org/10.35568/ABDIMAS.V1I2.327>
- Rickards, T. (1999). Brainstorming Revisited: A Question of Context. *International Journal of Management Reviews*, 1(1), 91–110. <https://doi.org/10.1111/1468-2370.00006>
- Rofiki, I., & Famuji, S. R. R. (2020). Kegiatan Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan untuk Membiasakan PHBS bagi Warga Desa Kemantren. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 628–634. <https://doi.org/10.31849/DINAMISIA.V4I4.3992>
- Yunika, R. P., Fariqi, M. Z., Cahyadi, I., Yunita, L., & Rahmiati, B. F. (2022). Pengaruh Edukasi PHBS Terhadap Tingkat Pengetahuan pada Yayasan Jage Kestare. *Karya Kesehatan Siwalima*, 1(1), 28–32. <https://doi.org/10.54639/KKS.V1I1.735>



Forum Group Discussion Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Busung Panjang

Annissa Valentina¹, Rizqi Apriani Putri², Marlioni Marlioni³

Program Studi Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji¹

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Maritim Raja Ali Haji²

Program Studi Manajemen, Universitas Proklamasi 45²

Email Korespodensi: nisavalen26@umrah.ac.id¹

Abstrak

Artikel ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Busung Panjang melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memetakan dan mengelola potensi sumber daya alam (SDA). Desa ini, yang terletak di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, memiliki potensi SDA yang besar terutama di sektor perikanan, namun menghadapi tantangan dalam pengelolaannya, baik dari segi pengetahuan, infrastruktur, dan aksesibilitas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa serta partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program berbasis potensi lokal secara berkelanjutan. Melalui FGD, perangkat desa dan masyarakat dilatih untuk mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan mengembangkan produk berbasis alam, khususnya sektor perikanan, yang dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Hasil FGD menunjukkan adanya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan SDA yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun, beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan sarana, serta rendahnya pengetahuan kewirausahaan, masih menghambat pemanfaatan SDA secara optimal. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan mencakup pelatihan lebih lanjut dalam kewirausahaan berbasis hasil laut, peningkatan akses terhadap modal, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung distribusi produk. FGD ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak eksternal untuk menciptakan model pengelolaan SDA yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagai rekomendasi, program-program pelatihan dan penguatan kapasitas kelembagaan perlu dilanjutkan dengan penekanan pada peningkatan infrastruktur dan akses pasar untuk mengoptimalkan potensi SDA yang ada, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

 <https://doi.org/10.69812/jpn.v1i1.85>

Artikel akses terbuka di bawah [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat pesisir adalah proses untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir melalui berbagai pendekatan yang bersifat inklusif, partisipasi, dan berkelanjutan (Butarbutar et al., 2020; Kusnadi, 2006). Tujuan utama pemberdayaan ini adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat pesisir untuk mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, seperti laut, pantai, dan ekosistem pesisir lainnya (Maryani & Nainggolan, 2019; Usman, 1998). Pemberdayaan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan sektor swasta, yang bekerja sama dalam memberikan pelatihan, penyuluhan, serta akses kepada teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir (Hendrayani et al., 2019; Kasmel & Andersen, 2011). Selain itu, pemberdayaan masyarakat pesisir juga berfokus pada peningkatan kesadaran lingkungan, agar masyarakat dapat mengelola sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusak ekosistem yang ada (Pratama, 2016; Setiawan, 2017).

Pada praktiknya, pemberdayaan masyarakat pesisir mencakup peningkatan kapasitas ekonomi dengan mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil, seperti budidaya ikan, pengolahan hasil laut, dan ekowisata berbasis pesisir. Selain itu, pemberdayaan ini juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, agar keberlanjutan lingkungan pesisir tetap terjaga untuk generasi mendatang (Alsop & Heinsohn, 2012; Scheyvens, 1999). Salah satu aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat pesisir adalah membangun jaringan sosial yang kuat antar warga, agar mereka dapat saling mendukung dalam menghadapi tantangan ekonomi maupun lingkungan yang ada. Dengan adanya pemberdayaan yang efektif, masyarakat pesisir diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pola hidup yang merusak, meningkatkan pendapatan mereka, serta lebih berdaya dalam mengelola lingkungan hidup mereka secara lebih mandiri dan berkelanjutan (Dolezal & Novelli, 2022; Nagaoka, 2011).

Desa Busung Panjang, yang terletak di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, memiliki karakteristik geografis yang unik, dikelilingi oleh pulau-pulau kecil dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor perikanan (Kurnianingsih et al., 2022). Sebagai desa yang baru terbentuk akibat pemekaran pada tahun 2013, Desa Busung Panjang menghadapi tantangan besar dalam mengelola potensi yang ada, terutama dalam memetakan dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Keberadaan desa ini juga dibarengi dengan keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, yang menyulitkan perkembangan ekonomi serta pemerintahan desa itu sendiri (Gautama et al., 2020; Trisnawati et al., 2018).

Urgensi kegiatan ini sangat jelas, mengingat rendahnya kapasitas kelembagaan perangkat desa dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Salah satu sektor yang belum digali secara maksimal adalah sektor perikanan yang menjadi andalan masyarakat Desa Busung Panjang. Walaupun potensi alam yang ada cukup besar, masyarakat masih menghadapi berbagai kesulitan, seperti keterbatasan dalam mengembangkan produk berbasis sumber daya alam, serta minimnya pengetahuan mengenai manajemen kewirausahaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan perangkat desa menjadi sangat penting untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Mitra dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa Busung Panjang, yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperkuat pemahaman mereka tentang pengelolaan sumber daya alam, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi alam. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor perikanan juga menjadi tantangan tersendiri dalam merancang solusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, Forum Group Discussion (FGD) ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemetaan potensi sumber daya alam (Mohamad & Shahrudin, 2014).

Forum Group Discussion (FGD) ini sangat penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Busung Panjang, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi alam yang ada. Dalam konteks ini, pemetaan potensi sumber daya alam menjadi langkah awal yang krusial untuk mengetahui apa saja yang bisa dioptimalkan dan dikembangkan oleh masyarakat. Selain itu, sektor perikanan yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat desa harus mendapat perhatian khusus, mengingat tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, FGD ini diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi yang mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa, memperkuat pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sumber daya alam, dan membuka peluang untuk pengembangan UMKM berbasis perikanan dan produk lokal. Ke depannya, pendekatan yang terintegrasi antara pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan menjadi kunci untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada perangkat desa dan masyarakat terkait

dengan pemetaan potensi sumber daya alam dan pemanfaatannya yang berkelanjutan. Melalui FGD ini, diharapkan peserta dapat mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi yang sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat desa agar mereka lebih siap dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pemberdayaan yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Desa Busung Panjang.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, dengan memberi mereka peran aktif dalam merencanakan dan melaksanakan program-program berbasis potensi lokal. Penguatan kapasitas kelembagaan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Potensi besar yang dimiliki oleh Desa Busung Panjang, terutama di sektor perikanan, memberikan peluang yang sangat besar bagi pembangunan ekonomi desa. Namun, tanpa pengelolaan yang baik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, potensi ini akan sulit untuk dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, diharapkan Desa Busung Panjang dapat menjadi model bagi desa-desa pesisir lainnya dalam hal pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dengan demikian, FGD ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat desa, tetapi juga untuk menggugah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Hal ini akan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir.

Metode Pengabdian

Untuk mengembangkan metode pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemetaan potensi sumber daya alam di Desa Busung Panjang, sebuah kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dapat dirancang dengan beberapa langkah utama di antaranya:

1. Pengenalan FGD akan melibatkan penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari proses pemberdayaan masyarakat. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir, seperti produk perikanan dan keanekaragaman hayati laut. Anggota masyarakat, termasuk pemimpin lokal, nelayan, dan kelompok kesejahteraan keluarga, akan dilibatkan untuk memahami pentingnya pemetaan sumber daya ini untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pengenalan ini bertujuan untuk membangkitkan minat dan menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam proyek pemetaan sumber daya berbasis masyarakat (Seal et al., 1998).
2. Metodologi FGD akan mencakup sesi interaktif. Sesi ini dirancang untuk mendorong diskusi, memungkinkan peserta untuk mengungkapkan wawasan mereka tentang sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. *Brainstorming* akan digunakan untuk mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi dalam memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif. Fasilitator akan memandu diskusi agar tetap fokus pada identifikasi peluang dan kendala dalam masyarakat, seperti akses ke pasar atau masalah lingkungan (Parker & Tritter, 2006).
3. Bagian workshop dari FGD akan memperkenalkan peserta pada alat dan teknik untuk pemetaan sumber daya (Nyumba et al., 2018). Para ahli teknis akan memberikan panduan tentang cara melakukan survei yang tepat dan menggunakan alat pemetaan geografis. Peserta akan dilatih untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi utama di mana sumber daya alam melimpah dan mengembangkan strategi untuk mengelola sumber daya ini secara berkelanjutan. Pelatihan teknis ini akan memastikan bahwa masyarakat memperoleh keterampilan yang berharga dalam pemantauan lingkungan dan pemetaan sumber daya, memungkinkan mereka untuk memiliki kontrol terhadap perkembangan desa mereka.

4. FGD akan ditutup dengan sesi untuk merumuskan rencana aksi. Pada fase ini, peserta akan berdiskusi tentang cara mengimplementasikan ide-ide yang dihasilkan selama diskusi. Mereka akan fokus pada pembuatan rencana aksi kolektif yang mencakup langkah-langkah praktis untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, seperti mendirikan bisnis lokal yang berbasis pada produk laut atau memperkenalkan praktik perikanan ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pemberdayaan ini berkelanjutan, dengan langkah-langkah yang jelas untuk implementasi dan tindak lanjut agar masyarakat tetap terlibat dan bertanggung jawab. Metode ini akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan mendorong kolaborasi masyarakat secara luas menuju visi pembangunan bersama (Wilkinson, 1998).

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Busung Panjang

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Busung Panjang, terdapat beberapa potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar di wilayah pesisir ini. Salah satunya adalah kekayaan biota laut yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Mayoritas penduduk desa ini bekerja sebagai nelayan, dan hasil tangkapan ikan mereka, seperti ikan tri, ketam, dan ikan selukur, sudah diekspor ke luar negeri. Potensi ini menunjukkan bahwa Desa Busung Panjang memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung ekonomi lokal. Akan tetapi, dalam mengelola potensi ini, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah desa, terutama dalam pengelolaan hasil laut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman mengenai manajemen kewirausahaan yang berkelanjutan. Hal ini terungkap dalam sesi Focus Group Discussion (FGD), di mana banyak peserta yang mengungkapkan ketidakmampuan mereka dalam mengelola hasil laut menjadi produk yang bernilai lebih. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah desa untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat, terutama ibu-ibu PKK, mengenai cara mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis pada hasil laut. Program pelatihan ini perlu melibatkan akademisi atau ahli kewirausahaan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengelolaan bisnis yang efisien dan berkelanjutan, keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung di Desa Busung Panjang menjadi tantangan besar dalam mengoptimalkan potensi SDA yang ada.

Sarana transportasi yang terbatas, terutama akses ke ibu kota kabupaten yang hanya dapat dijangkau dengan kapal kayu, menyebabkan biaya logistik yang tinggi dan menghambat distribusi hasil tangkapan laut. Selain itu, masalah penerangan yang belum sepenuhnya memadai dan konektivitas internet yang lemah memperburuk kondisi ini. Untuk itu, penting bagi pemerintah desa untuk menggali potensi energi alternatif, seperti pembangkit listrik tenaga angin yang sesuai dengan kondisi geografis desa ini, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi lokal. Sanitasi yang menjadi permasalahan utama di desa ini, khususnya terkait dengan ketersediaan air bersih. Desa Busung Panjang sangat tergantung pada sumber mata air yang terbatas, dan hal ini menyebabkan krisis air bersih yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Pemerintah desa perlu bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menemukan solusi jangka panjang, seperti pembangunan sistem penyediaan air bersih yang terintegrasi dan memadai. Program sanitasi, seperti toilet umum yang sudah mulai dibangun di beberapa pulau, perlu diperluas dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan FGD di Desa Busung Panjang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika didukung dengan kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan pihak luar seperti akademisi. Penguatan kapasitas kelembagaan perangkat desa melalui bimbingan teknis dan sosialisasi juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan efektif. Selain itu, penting untuk memperkuat kerja sama antara perangkat desa, RT, dan RW untuk menyelesaikan

permasalahan yang ada dan mengoptimalkan pemanfaatan SDA untuk pembangunan yang berkelanjutan.

2. Peran Pembinaan Perangkat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Berdasarkan hasil pengabdian yang dilaksanakan di Desa Busung Panjang, peran pembinaan perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat pesisir sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pembinaan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat mencakup berbagai kegiatan seperti sosialisasi, workshop, bimbingan teknis (BIMTEK), dan Focus Group Discussion (FGD). Dalam kegiatan tersebut, perangkat desa diberikan pemahaman dan keterampilan untuk mengelola potensi sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, terutama yang berkaitan dengan sektor kelautan. Melalui pendekatan ini, diharapkan perangkat desa dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan memanfaatkan potensi alam secara berkelanjutan.

Pembinaan perangkat desa di Desa Busung Panjang juga mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan desa melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas dalam manajemen pemerintahan desa yang lebih baik. Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melaksanakan tugas pemerintahan, termasuk dalam hal pelayanan publik yang efisien. Dengan demikian, perangkat desa dapat lebih proaktif dalam menjalankan program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.



Gambar 1. Pelaksanaan FGD di Des Busung Panjang
Sumber: Penulis, 2022

Dalam FGD yang dilaksanakan, salah satu tema yang dibahas adalah pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemetaan potensi sumber daya alam. Desa Busung Panjang, yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun masih terbatas dalam hal pengelolaan yang berkelanjutan. Pembinaan perangkat desa dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pengelolaan potensi alam dengan cara yang ramah lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu solusi yang diajukan dalam diskusi adalah pentingnya pengembangan produk UMKM berbasis hasil laut yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi perangkat desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Kondisi geografis Desa Busung Panjang yang terletak di pulau-pulau yang terpisah membuat akses terhadap fasilitas umum dan

teknologi informasi menjadi terbatas. Oleh karena itu, pembinaan perangkat desa tidak hanya mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga harus mencakup penguatan infrastruktur dan aksesibilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan. Tim pengabdian memberikan rekomendasi agar pemerintah desa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti penyediaan listrik yang lebih baik dan akses internet yang stabil.



Gambar 2. Tim PKM melakukan Diskusi Kelompok
Sumber: Penulis, 2022

Akhirnya, keberhasilan dari pembinaan perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat pesisir sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Pembinaan yang dilakukan tidak akan berhasil jika masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi perangkat desa untuk terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Dengan adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat, program-program pemberdayaan yang dijalankan akan lebih efektif dan berkelanjutan, serta dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir di Desa Busung Panjang.

3. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik dan Birokrasi di Desa Busung Panjang

Dalam evaluasi kinerja pelayanan publik dan birokrasi di Desa Busung Panjang, berbagai tantangan telah diidentifikasi yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan temuan di lapangan, terbukti bahwa pelayanan publik di desa ini masih jauh dari optimal, terutama terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah ke tidak cukupan listrik di desa yang hanya mengandalkan diesel pada saat acara pemerintahan. Selain itu, masalah jaringan internet yang lemah juga menghambat kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan yang efisien dan minimnya pengetahuan dan keterampilan administrasi yang dimiliki oleh perangkat desa, yang menyebabkan banyak kesalahan dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, FGD yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat di desa ini memiliki peran penting. Dalam kegiatan tersebut, perangkat desa diberi pelatihan mengenai cara-cara yang sesuai dengan regulasi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat .

Selain itu juga yang dilakukan oleh tim pengabdian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara perangkat desa, termasuk RT dan RW, masih belum optimal. Hal ini berdampak pada

ketidaksiuaian dalam pelaksanaan tugas serta pelayanan publik yang tidak maksimal. Pemetaan konflik ini memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada dan solusi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki hubungan antar perangkat desa. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan menerapkan sistem komunikasi yang lebih baik dan inovatif, serta melakukan koordinasi yang lebih erat antar pihak yang terlibat .

Evaluasi lebih lanjut mengungkap dalam sektor sanitasi juga menjadi masalah besar. Desa Busung Panjang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan sumber air bersih, yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam menyediakan akses air bersih dan meningkatkan fasilitas sanitasi di desa ini. Keterbatasan ini berkontribusi pada kondisi kesehatan masyarakat yang belum sepenuhnya terjaga, yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pusat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini dalam FGD mengungkapkan kualitas pelayanan publik di Desa Busung Panjang, dibutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah daerah. Diperlukan inovasi dalam kebijakan dan peningkatan kapasitas birokrasi desa agar pelayanan yang diberikan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan perbaikan dalam infrastruktur, sistem administrasi, dan koordinasi antar perangkat desa, diharapkan pelayanan publik di Desa Busung Panjang dapat meningkat secara signifikan, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat .

4. Tantangan dan Solusi dalam Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal

Tantangan dalam pengembangan UMKM berbasis potensi lokal sering kali berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha tersebut. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM di daerah berbasis potensi lokal, seperti Desa Busung Panjang, antara lain:

- a. Keterbatasan Akses ke Modal dan Pembiayaan; Banyak UMKM di desa terkendala dalam memperoleh akses ke modal usaha yang cukup. Bank dan lembaga keuangan formal sering kali memiliki persyaratan yang sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM, seperti jaminan yang tidak dimiliki oleh mereka. Keterbatasan dana ini menghambat UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan pasar. Pemerintah bisa memberikan program pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM melalui skema kredit mikro atau dengan melibatkan lembaga keuangan non-bank yang menyediakan pinjaman tanpa jaminan. Selain itu, pemberian pelatihan mengenai manajemen keuangan dan pemahaman sistem pembiayaan bisa membantu UMKM mengelola dana yang mereka miliki secara lebih efektif.
- b. Kurangnya Keterampilan dan Pengetahuan dalam Pengelolaan Bisnis; Banyak pengusaha kecil di daerah pesisir yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan bisnis, pemasaran, dan inovasi produk. Hal ini menyulitkan mereka dalam meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Penyuluhan dan pelatihan berbasis keterampilan praktis dan manajerial sangat dibutuhkan. Program seperti bimbingan teknis dan workshop yang mengajarkan cara mengelola bisnis, membuat produk yang sesuai dengan permintaan pasar, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk pemasaran bisa menjadi solusi. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan berbasis teknologi juga dapat membantu mereka mengembangkan produk yang lebih inovatif dan lebih mudah dipasarkan.
- c. Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Pasar; Infrastruktur yang buruk, seperti transportasi dan sarana komunikasi yang terbatas, sering kali menjadi kendala utama bagi UMKM dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, ketergantungan pada pasar lokal yang terbatas membuat UMKM sulit berkembang. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian lebih pada pengembangan infrastruktur dasar yang mendukung kelancaran distribusi barang dan akses pasar, seperti perbaikan jalan, penyediaan listrik, serta pengembangan jaringan internet untuk mendukung transaksi digital.

Selain itu, kerjasama dengan platform *e-commerce* dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan memberikan kesempatan bagi produk lokal untuk dipasarkan secara lebih luas, bahkan secara internasional.

- d. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Belum Optimal; UMKM di desa berbasis potensi alam sering kali belum dapat mengelola sumber daya alam secara optimal. Misalnya, hasil tangkapan ikan atau produk laut lainnya belum diolah menjadi produk bernilai tambah yang lebih tinggi, sehingga mereka terjebak dalam pola bisnis yang hanya bergantung pada komoditas mentah. Pemberdayaan masyarakat untuk mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah merupakan kunci. Pelatihan tentang teknologi tepat guna, pengolahan produk secara lebih modern, serta kemasan yang menarik dapat meningkatkan nilai jual produk. Misalnya, mengolah ikan menjadi ikan olahan atau produk makanan khas lokal yang bisa dipasarkan lebih luas. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku UMKM tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pasar komoditas mentah.
- e. Keterbatasan Dukungan Pemerintah dan Lembaga terkait; Sering kali, UMKM di desa tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah atau lembaga terkait dalam hal pemasaran, pengembangan produk, atau akses ke teknologi terbaru. Banyak kebijakan yang belum terjangkau oleh pelaku usaha kecil ini, yang menyebabkan mereka tertinggal dalam persaingan pasar. Pemerintah harus lebih aktif dalam memberikan bantuan kepada UMKM melalui kebijakan yang mendukung pengembangan usaha lokal, seperti program pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal, penyuluhan tentang hak cipta dan paten produk, serta dukungan dalam akses teknologi dan pasar. Kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, atau perusahaan besar juga dapat membuka peluang baru bagi UMKM untuk mengakses teknologi terbaru dan meningkatkan kapasitas produksi mereka.

Dengan menyelesaikan tantangan-tantangan ini dan menerapkan solusi yang tepat, pengembangan UMKM berbasis potensi lokal dapat lebih maksimal, mendorong perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pada pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan di Desa Busung Panjang, terlihat peningkatan yang signifikan dalam partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). FGD ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pemetaan potensi SDA yang ada di wilayah pesisir tersebut. Sebelumnya, masyarakat cenderung pasif dalam mengelola SDA, sering kali mengandalkan pemerintah atau pihak luar untuk mengambil keputusan. Namun, melalui forum ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk berbicara, berbagi pengetahuan, dan memberikan masukan terkait pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa mereka. Terlihat bahwa, setelah FGD, masyarakat menunjukkan minat yang lebih besar dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan SDA, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian alam.

Salah satu aspek penting yang dibahas dalam FGD adalah pemetaan potensi SDA yang ada di pesisir Desa Busung Panjang. Masyarakat secara langsung terlibat dalam mengidentifikasi berbagai potensi, baik itu terkait dengan hasil laut seperti ikan, terumbu karang, maupun potensi pariwisata berbasis alam yang dapat dikembangkan di desa mereka. Proses ini membuka wawasan baru bagi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan SDA, mengingat sebagian besar pendapatan mereka bergantung pada alam. Partisipasi aktif dalam pemetaan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang potensi yang ada, tetapi juga memberi mereka rasa kepemilikan terhadap sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian, mereka lebih terdorong untuk menjaga dan melestarikan SDA agar tetap bermanfaat bagi generasi mendatang.

Selanjutnya, FGD ini juga membahas tantangan yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan SDA, termasuk masalah kerusakan lingkungan akibat kegiatan ilegal dan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Diskusi ini memperlihatkan bahwa masyarakat pesisir sering kali terjebak dalam pola konsumsi yang merusak karena kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjang terhadap

lingkungan. Oleh karena itu, salah satu hasil penting dari forum ini adalah adanya kesepakatan bersama untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan. Peningkatan pengetahuan mengenai praktek-praktek ramah lingkungan dan pengelolaan berbasis masyarakat menjadi salah satu poin utama yang harus dijalankan pasca forum. Melalui pemberdayaan seperti ini, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kelestarian alam dan mulai merancang strategi untuk mengurangi kerusakan yang sudah terjadi.

Selain itu, pelibatan berbagai pihak dalam FGD, seperti pemerintah daerah, LSM, dan akademisi, sangat memperkaya diskusi dan memberikan pandangan yang lebih luas tentang pengelolaan SDA. Kehadiran pihak-pihak ini juga memberi dorongan agar masyarakat pesisir tidak merasa sendirian dalam menghadapi tantangan yang ada. Kolaborasi antara masyarakat dan berbagai stakeholders ini penting untuk menciptakan model pengelolaan SDA yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, FGD menjadi sarana penting untuk membangun jejaring yang kuat antara masyarakat pesisir dengan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan, sumber daya, dan kapasitas untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada. Pemahaman yang lebih baik tentang peran masing-masing pihak dapat memperkuat rasa kebersamaan dalam menjaga dan memanfaatkan SDA dengan bijaksana.

Secara keseluruhan, FGD ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan baru tentang potensi SDA, tetapi juga belajar untuk lebih aktif dalam menjaga kelestariannya. Ke depannya, untuk mempertahankan momentum ini, perlu ada kegiatan lanjutan yang dapat memfasilitasi implementasi hasil-hasil diskusi yang telah dicapai. Program-program pendidikan dan pelatihan lebih lanjut sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan teknis dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pesisir akan semakin kokoh dan berperan penting dalam pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kesimpulan

Forum Group Discussion (FGD) di Desa Busung Panjang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemetaan potensi sumber daya alam (SDA) memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA. Desa Busung Panjang memiliki potensi besar dalam sektor kelautan, seperti kekayaan biota laut yang telah diekspor ke luar negeri, serta potensi pariwisata berbasis alam. Namun, dalam pengelolaannya, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan pengetahuan mengenai manajemen kewirausahaan, infrastruktur yang kurang memadai, serta masalah sanitasi dan akses air bersih. Oleh karena itu, kegiatan FGD yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, akademisi, dan LSM menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

Proses pemberdayaan masyarakat melalui FGD juga menyoroti pentingnya pembinaan perangkat desa dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya alam. Pembinaan ini mencakup peningkatan kapasitas manajerial, pemahaman tentang kebijakan dan regulasi yang ada, serta pelatihan kewirausahaan berbasis hasil laut. Selain itu, diskusi dalam FGD menyarankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam memecahkan permasalahan yang ada, seperti peningkatan infrastruktur, akses pembiayaan, dan pengelolaan SDA secara efisien dan ramah lingkungan. Hal ini penting untuk menciptakan model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Dalam konteks pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses ke modal, infrastruktur yang buruk, serta kurangnya pengetahuan dalam mengelola bisnis dan pemasaran. Pembinaan terhadap pelaku UMKM, terutama dalam mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tambah, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan memperkuat kapasitas UMKM melalui pelatihan dan penyuluhan yang melibatkan teknologi

serta sistem pemasaran yang lebih luas, seperti platform e-commerce, diharapkan produk lokal dapat lebih berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat melalui FGD di Desa Busung Panjang menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan SDA, serta dukungan kebijakan yang tepat, merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ucapan Terima Kasih

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Busung Panjang. Terutama kepada Pemerintah Desa Busung Panjang yang telah memberikan dukungan penuh, serta kepada para peserta yang telah aktif berpartisipasi dan berbagi pengetahuan dalam diskusi yang sangat konstruktif ini. Kami juga mengapresiasi kepada tim pengabdian yang telah bekerja keras dalam merancang, menyelenggarakan, dan mendokumentasikan seluruh kegiatan ini. Keberhasilan forum ini tidak terlepas dari komitmen dan kerjasama semua pihak yang terlibat, yang sangat berarti dalam upaya meningkatkan pemahaman serta pengelolaan potensi sumber daya alam di daerah pesisir. Semoga hasil dari forum ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan Desa Busung Panjang dan masyarakat pesisir secara umum.

Daftar Pustaka

- Alsop, R., & Heinsohn, N. (2012). *Measuring Empowerment in Practice: Structuring Analysis and Framing Indicators*. World Bank Publications.
- Butarbutar, D. N., Sintani, L., & Harinie, L. T. (2020). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemberdayaan Perempuan. *Journal of Environment and Management*, 1(1), 31–39. <https://doi.org/10.37304/JEM.V111.1203>
- Dolezal, C., & Novelli, M. (2022). Power in community-based tourism: empowerment and partnership in Bali. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(10), 2352–2370. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1838527>
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355–369. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>
- Hendrayani, Y., Hashim, N. H., Zen, I. S., & Titisari, P. W. (2019). Stakeholders Collaborations Process Towards Community Empowerment: The Success Story West Java CSR Forum. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 298(1), 012035. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/298/1/012035>
- Kasmel, A., & Andersen, P. T. (2011). Measurement of Community Empowerment in Three Community Programs in Rapla (Estonia). *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2011, Vol. 8, Pages 799–817, 8(3), 799–817. <https://doi.org/10.3390/IJERPH8030799>
- Kurnianingsih, F., Putri, R. A., Mahadiansar, M., & Valentina, A. (2022). Pembinaan Kapasitas Kelembagaan Desa di Kawasan Pesisir: Pengalaman di Desa Busung Panjang Kabupaten Lingga. *Alfatina: Journal of Community Services*, 2(1), 6–18. <https://journal.inspire-kepri.org/index.php/JoCS/article/view/84>
- Kusnadi. (2006). *Filosofi pemberdayaan masyarakat pesisir* (1st ed.). Humaniora.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*.
- Mohamad, M., & Shahrudin, S. (2014). Online Forum Discussion to Promote Sense of Learning Community among the Group Members. *International Education Studies*, 7(13), 61–74. <https://doi.org/10.5539/ies.v7n13p61>
- Nagaoka, M. (2011). Revitalization of Borobudur: Heritage tourism promotion and local community empowerment in cultural industries. *ICOMOS 17th General Assembly*.

- O.Nyumba, T., Wilson, K., Derrick, C. J., & Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(1), 20–32. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12860>
- Parker, A., & Titter, J. (2006). Focus group method and methodology: current practice and recent debate. *International Journal of Research & Method in Education*, 29(1), 23–37. <https://doi.org/10.1080/01406720500537304>
- Pratama, W. D. A. (2016). Evaluasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. *J+PLUS UNESA*, 5(1), 1–7. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/36/article/view/16059>
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(98\)00069-7](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00069-7)
- Seal, D. W., Bogart, L. M., & Ehrhardt, A. A. (1998). Small group dynamics: The utility of focus group discussions as a research method. *Group Dynamics*, 2(4), 253–266. <https://doi.org/10.1037/1089-2699.2.4.253>
- Setiawan, R. (2017). Manajemen pemberdayaan masyarakat pesisir. *Umrahpress*, 304.
- Trisnawati, A. E., Wahyono, H., & Wardoyo, C. (2018). Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Pendidikan*, 3(1), 29–33. <https://doi.org/10.17977/JPTPP.V3I1.10356>
- Usman, S. (1998). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Wilkinson, S. (1998). Focus group methodology: a review. *International Journal of Social Research Methodology*, 1(3), 181–203. <https://doi.org/10.1080/13645579.1998.10846874>